



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DARI IBU KE BAPAK DALAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr)**

SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memeperoleh Gelar

Sarjana Hukum

(SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

MUHAMMAD HAFIS

11621100794

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1442 H/2020 M



PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul: **PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DARI IBU KE BAPAK DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr).**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Hafis
 Nim : 11621100794
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. H. Johari, M.Ag
 NIP. 19640320199102 1 001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Pengalihan Hak Asuh Anak Dari Ibu Ke Bapak Dalam Perspektif Maqāsid Syari'ah (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr), yang ditulis oleh :

Nama : **Muhammad Hafis**
 NIM : 11621100794
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : 9 Maret 2020
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, SHL., MA

Penguji I
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji II
Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa.
 3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul: Pengalihan Hak Asuh Anak Dari Ibu Ke Bapak Dalam Perspektif Maqāsid Syari'ah (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr), yang ditulis oleh :

Nama : **Muhammad Hafis**
 NIM : 11621100794
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : 9 Maret 2020
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, SHL., MA

Penguji I
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji II
Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag

Mengetahui :
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Motto

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Asy-Syarh)[94]: 7-8)

Berfikirilah bahwa dirimu diciptakan untuk urusan besar, agar semangat dan hasratmu bangkit menjadi luar biasa. Semangat untuk meraih suatu yang besar dan lebih bernilai. Semangatmu dapat menghancurkan rintangan dan penghalang. Akhirnya engkau mampu menjadi manusia terdepan. Kunci Kebahagiaan dan rahasia kaya ada ditanganmu; kaya harta dan kaya hati. Engkau dapat menikmati surga di dunia dan surga di akhirat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk
 Almamaterku Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Saudara dan Saudariku serta masa depanku yang sukses dan bahagia
 Untuk Ayahku Muluk sang Inspiratorku.
 Untuk Ibuku Almarhumah Sapinah wanita nomor satu di dunia
 Insya Allah, esok lusa kita akan bertemu kembali.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓals	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
وِ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan harakat	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ \ اِ \ اِى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis diatas
وِ	Dammah dan ya	ū	u dengan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : mata
رَمَى : rama>

قِيلَ : qila
يَمُوتُ : yamutu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu ta marbutah yang hidup dan mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudhah al-atfal
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madinah al-fadilah
الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau tasyid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda yang diberi tanda syaddah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbana>
 الْحَقُّ : al-haqqu
 نِعَم : ni"ima
 عَدُو : 'aduwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh :

عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
 عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif dan lam). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi sesuai dengan bunyinya baik diikuti oleh huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.

Contoh:

الشَّمْسُ : asy-syamsu
 الزَّلْزَلَةُ : az-zalزالah
 الفَلَسَفَةُ : al-falsafah
 الْبِلَادُ : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'muruna

النَّوْءُ : al-nau'

شيء : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai aturan tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital misalnya digunakan pada awal nama orang, tempat atau bulan dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Syahru ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Al-gazalî>

Al-Munqiz | min al-Dalal

Penulisan bahasa Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Seperti kata al-Qur'an, Sunah, khusus dan umum. Namun jika kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilal-Qur'an

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz} la bi khusus} al-sabab



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Hafis, Nim: 11621100794. **Pengalihan Hak Asuh Anak Dari Ibu Ke Bapak Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah**
(Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr)

Penulisan skripsi ini berdasarkan latar belakang, hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, "Sesungguhnya seorang perempuan berkata kepada nabi: "Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, puting saya yang mengairinya dan haribaan saya yang memeluknya. Ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan anak saya itu dengan saya. Nabi ﷺ bersabda. " engkau lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum kawin". (H.R. Abu Daud).

Begitu juga Intruksi Presiden No. 01/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, apabila kedua orang tua cerai dan terjadi perebutan hak asuh anak (*hadhanah*) maka ibulah yang paling berhak menjadi pengasuh atau pendidik sampai ibu tersebut menikah lagi, berbeda dengan putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A yang mengalihkan hak asuh anak perempuan berumur 7 bulan kepada bapak, karena alasan *hifzu ad-Din* (memelihara aqidah anak). Sebagai perumusan masalah yaitu, Bagaimana putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr? Bagaimana Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1835/Pdt. G/2018/PA.? Bagaimana tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr.?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang di lakukan di perpustakaan (*library reseach*). Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan mengkaji Putusan hakim No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr. dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, dan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan (*hadhanah*) anak yang belum *mumayyiz* harus diperhatikan kemaslahatannya baik dari segi materil maupun immateril dan segi dunia maupun akhirat. Dalam hal ini apabila di tinjau berdasarkan *Maqasid Syari'ah*, maka hak asuh anak yang pada dasarnya hak ibu dapat di alihkan ke bapak, sebagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr.

Kata kunci: Pengalihan, *Hadhanah*, *Maqasid Syari'ah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Subhānu wa Ta'ālā yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **“Pengalihan Hak Asuh Anak Dari ibu ke Bapak Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr) ”**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan buat Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi wa Sallam, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Kajian maqasid syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di berbagai negara Islam, termasuk di Indonesia. Maqasid syariah dewasa ini dijadikan pisau analisis untuk mengungkap hikmah dari hukum Islam dan Untuk meninjau perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Berbagai persoalan hukum pun merupakan hal-hal yang baru seringkali dianalisa dengan menggunakan tinjauan perspektif Maqasid syariah, sebagaimana yang penulis lakukan saat ini.

Skripsi ini merupakan hasil karya yang sangat berharga bagi penulis. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada pada penulis, telah penulis kerahkan untuk menyelesaikan karya ini sehingga dapat tersajikan dihadapan saudara pembaca, karena kecintaan penulis yang terhadap maqasid Syari'ah sehingga penulis menjadikan judul ini sebagai tugas terhadap akhir untuk mendapatkan gelar sarjana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Rampunya penulisan ini tentunya tidak lepas dari bantuan keluarga, kalangan akademik UIN SUSKA RIAU dan rekan-rekan sekalian, karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta Muluk Nasution dan Ibunda tercinta Almh. Sapinah Lubis beserta seluruh abang dan kakak saya: Nur 'Aini Nasution, Sollih Nasution, Ennida Nasution, Solahuddin, SE,Sy Nasution, Nurhasanah Nasution, Zainal Abidin Nasution S.Pd dan Lahmuddin Nasution yang telah memberikan semangat dan dorongan yang tidak ternilai harganya.
2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag,M. Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. H. Heri Sunandar, Mcl selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Wahidin, MA selaku wakil dekan II, Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA selaku wakil Dekan III, yang telah membina penulis selama kuliah di fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah beserta bapak Ade Fariz Fakhnullah, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan *Sprit* intelektual kepada penulis selama di UIN SUSKA.
5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar seperti yang diharapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Untuk Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, dan untuk kawan-kawan satu Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah angkatan 2016, terkhusus kepada Saudara Imam Assyatibi, Danang Nofianto, Habibillah, Aji Mufid dan Yongki Arisandi yang telah memberikan banyak bantuan baik materi maupun non materi selama menempuh pendidikan Strata 1 di UIN SUSKA baik suka maupun duka.

Penulis tentunya tidak menapikan bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca.

Penulis

Muhammad Hafis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II PROFIL PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

I. Peradilan Agama di Indonesia	
A. Pengertian Peradilan Agama.....	24
B. Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia.....	25
C. Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia.....	26
D. Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia.....	28
E. Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia.....	29
F. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama di Indonesia.....	33
G. Klasifikasi Peradilan Agama di Indonesia.....	34
H. Sejarah Singkat Peradilan Agama Pekanbaru	36
II. Putusan Pengadilan Agama di Indonesia	
A. Pengertian Putusan dan Asas Putusan	48
B. Macam-macam Putusan	51
C. Otonomi Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Hakim Melakukan Contra Legem.....	58
E. Kedudukan Putusan Pengadilan Agama di Indonesia	59

BAB III TINJAUAN UMUM HADANAH DAN MAQASID SYARI'AH

I. Hadanah	
A. Definisi Hadanah	61
B. Dasar Hukum Hadanah	67
C. Pihak-pihak Yang Berhak Atas Hadanah	71
D. Syarat-Syarat Hadanah	76
E. Upah Pemegang Hadanah	85
F. Masa Hadanah	86
II. Maqasid Syari'ah	
G. Pengertian Maqasid Syari'ah	87
H. Sejarah Maqasid Syari'ah	93
I. Tujuan dan Klasifikasi Maqasid Syari'ah	95

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DARI IBU KE BAPAK DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH

A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.....	112
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.....	115
C. Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.....	118

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	142
B. Saran.....	143

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan agama adalah salah satu lembaga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.¹ Peradilan agama hanya berwenang di bidang perdana tertentu, tidak termasuk bidang pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, serta dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu dan tidak mencakup seluruh perdata Islam.²

Dari segi kewenangan, Peradilan agama di Indonesia dapat digolongkan ke dalam peradilan khusus karena mengadili perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.³ Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu,

¹ UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).

² Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 7.

³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-4, h. 159.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara tertentu yang menjadi kewenangan Peradilan agama dijelaskan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.⁴

Eksistensi Peradilan agama sebagai peradilan khusus bagi orang-orang beragama Islam dalam masyarakat majemuk tidak dapat dihindarkan dari persoalan penegakan keadilan bagi semua warga negara terlepas dari agama seseorang, atau penegakan keadilan atas nama agama (bagi orang-orang Islam). Hal ini karena dalam masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama dan budaya, hubungan hukum yang terjadi antara pihak yang berbeda agama tidak dapat dihindari, terkhusus dalam bidang hukum keluarga.⁵

Dari kewenangan Peradilan agama yang tercantum dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di atas, dalam penelitian ini penulis memfokuskan di bidang perkawinan, perkawinan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kawin di artikan dengan (1) perjodohan laki-laki dan

⁴ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh) Edisi (Jakarta: kencana, 2010), Cet. Ke-2, h. 149.

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Undang-undang No. 7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), Cet. Ke-3, h. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan menjadi suami istri; nikah (2) (sudah) beristri atau berbini dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.⁶

Defenisi perkawinan juga bisa dilihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".⁷

Perkawinan merupakan salah satu perintah Agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Karena perkawinan sesuai dengan syariat Islam adalah: menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan, menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan, menjaga keseimbangan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan dari masyarakat,

⁶ Lihat W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1985), h. 453.

⁷ Lihat Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974, pasal 1. (New Merah Putih, 2009), h. 12.



menciptakan sikap bahu-membahu antara suami istri untuk mengemban beban kehidupan, sebuah akad kasih sayang dan tolong menolong di antar golongan, dan penganut hubungan antar keluarga.⁸

Perkawinan memberikan ketenangan bagi laki-laki dan perempuan. Pada perkawinan terlihat kedua mempelai hidup secara harmonis, tentram, dan saling menopang hidup di dunia yang penuh dengan aneka ragam permasalahan. Ketika seorang suami letih menghadapi pekerjaannya atau menghadapi kehidupan dunia, ia akan menemukan ketentraman dan kenyamanan di rumahnya. Sang istri pun merasa tenteram dengan keberadaan suami yang membanting tulang demi menghidupi keluarga. Ia kemudian dengan serius mengurus pekerjaan rumah dan segala kebutuhan anak-anaknya. Sehingga ia akan merasakan kebahagiaan yang tiada tara.⁹

Sebagaimana firman Allah Subhānu wa Ta'ālā dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

dan di antara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 40-41.

⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, Judul asli, *Al Wajiz fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah*, alih bahasa oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rum [30]: ayat 21)¹⁰

Dari ayat di atas jelaslah bahwa perkawinan disyariatkan untuk membentuk sebuah keluarga yang menjamin adanya kebahagiaan dan kasih sayang. Sedang sebuah keluarga tidak akan seperti itu, kecuali masing-masing pasangan berusaha saling bahu-membahu untuk mewujudkan kehidupan yang tenang, menentramkan pasangannya, saling membagi cinta, dan saling membagi kasih sayang.¹¹

Perlu diketahui bahwa hal yang mendasar dalam perkawinan adalah kontinuitas. Tidak akan pernah ada kekekalan dan kelanggengan, kecuali masing-masing pasangan terus bekerja sama, saling menentramkan, saling mencintai, dan saling mengasihi.¹² Namun, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bila hubungan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.¹³

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 406.

¹¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Op. Cit*, h. 312- 314.

¹² Ibid.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 190.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun berbagai permasalahan akan muncul akibat terjadinya perceraian, baik dalam pembagian harta bersama bahkan sampai hak asuh anak, di tengah-tengah masyarakat hak asuh anak sering jadi topik permasalahan pasca perceraian, karena ibu maupun bapak sama-sama merasa punya hak dalam mengasuh.

Dalam tatanan hukum Indonesia, untuk mendapatkan hak asuh anak baik ibu atau bapak harus menempuh melalui litigasi supaya adanya kepastian hukum. Dalam hal ini, jika terjadi perselisihan maka Peradilan akan memeberikan putusan, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 pasa 41 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁴

Dalam istilah fiqih, pemeliharaan anak disebut dengan istilah *hadhanah*. Para fuqaha' mengartikan hak asuh anak (*al-Hadhanah*) sebagai upaya menjaga anak lelaki kecil, atau anak perempuan kecil,¹⁵ atau anak yang memiliki gangguan mental yang tidak dapat membedakan sesuatu dan tidak mampu hidup mandiri, mengembangkan kemampuannya, melindunginya dari segala hal yang menyakiti dan membahayakan, dan meningkatkan fisik, mental dan akalnya agar mampu mengemban beban hidup dan menunaikan tanggung jawabnya.¹⁶

Berdasarkan hal itu, pada fase pertama kehidupan anak, Allah 'Azza wa Jalla memberikan hak untuk mendidik kepada ibu, sebab ibu lebih lembut

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (Jogjakarta: Laksana, 2013), h. 33.

¹⁵ Kata Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunnah* Faktor kecil dan gangguan mental menjadi syarat kewajiban mengasuh anak, karena anak yang sudah balig dan dewasa, pada dasarnya tidak membutuhkan pengasuhan anak. Dia boleh memilih tinggal bersama salah satu orang tuanya. Jika dia laki-laki, maka dia boleh tinggal sendirian, karena tidak lagi bergantung pada kedua orang tua, tapi dianjurkan tidak berpisah dengan orang tua supaya tetap dia bisa berbakti kepada mereka. Tapi jika perempuan, maka tidak boleh tinggal sendirian.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Asep Sobri, Muhil Dhofir, Sofwan Abbas, dan Amir Hamzah, (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2000), h. 527.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mampu mendidik, serta memberikan perhatian yang sangat baik dalam fase ini daripada laki-laki (bapak).¹⁷

Alasan yang dikemukakan di atas terdapat juga dari sepotong hadits Nabi Sāllāhahu 'Alaihi wa Sallam dari Abdullah bin Mas'ud menurut yang diriwayatkan Ahmad, Abū Daud, dan disahkan oleh Hākim.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أَنَّ أَمْرًا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَتْ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرُهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَارَادَ أَنْ يَتَزَعَّهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹⁸

“Sesungguhnya seorang perempuan berkata kepada nabi: “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, puting saya yang mengairinya dan haribaan saya yang memeluknya. Ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan anak saya itu dengan saya. Nabi Sāllāhahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. “engkau lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum kawin”. (H.R. Abu Daud)

Kemudian terdapat juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 menjelaskan dalam hal terjadinya perceraian tentang hak asuh anak atau *ḥadānah* ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥadānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

¹⁷ Abdul Majid Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, alih bahasa oleh Harits Fadly dan Ahmad Khatib, (Solo: Era Inter media: 2005) , h. 584.

¹⁸ Abū Dawud, Sulaiman bin al-‘Asy as-Sijistani, *Sunan Abu>Dawud, Kitab Nikah Bab Man, Ahaqqu Li al-Walad*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), Cet. Ke-2, h. 283.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wanita-wanita garis lurus
2. ke atas dari ibu;
3. Ayah;
4. Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ayah;
5. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
6. Wanita-wanita kerabat menurut garis kesamping dari ibu;
7. Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah;
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *haddanah* dari ayah atau dari ibu;
- c. Apabila pemegang *haddanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *haddanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *haddanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *haddanah* pula;
- d. Semua biaya *haddanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mengurus diri sendiri (21 Tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *haddanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), (c), dan (d).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.¹⁹

Berdasarkan hadis dan Kompilasi Hukum Islam di atas, setelah perceraian kedua orang tuanya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang berhak memelihara anak adalah ibu, namun dalam berbagai situasi, hak-hak ini perlu dipelihara untuk menyatukan hak-hak tersebut. Apibala mungkin menyatukan hak-hak ini maka ia ada pada diri si ibu. Namun bila tidak, maka hak anak harus didahulukan daripada hak ibu dan bapak secara bersamaan.

Para ulama sepakat bahwa yang didahulukan dalam pengasuhan anak adalah kemaslahatan dari pengasuhan anak, sekaligus tidak ada kerusakan. Apabila ada kerusakan/kemudaratatan pada salah satu kedua orang tua, maka yang lain lebih utama tanpa diragukan lagi. Syari'at tidak bertujuan mendahulukan satu diantara yang lain sekedar karena hubungan kerabat. Akan tetapi, syari'at mendahulukan pihak yang lebih utama, lebih mampu dan lebih baik.²⁰

Berkaitan dengan maslahat, al- Syatibi mempergunakan kata yang berbeda dengan kata maqāṣid al-Syari'ah sebagaimana yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1999/2000), h. 72-73.

²⁰ Al-Bassam Abdullah bin Abdurrahman, *al-Syarah al-Bulugul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 65-66.

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا مع

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”

Dalam ungkapan lain dikatakan oleh al-Syatibi:

“Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatn hamba”.²¹

Dari pernyataan al-Syatibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan maqāṣid al-Syarīah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.²²

Soal menyatukan kemaslahatan, dalam hal ini kemaslahatan anak pasca perceraian kedua orang tuanya, harus diserahkan kepada hakim supaya Kemaslahatan itu di pertimbangkan, sebagaimana dalam putusan hakim No. 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Yang dalam putusannya mengalihkan hak asuh anak kepada bapak dengan alasan memelihara agama (*Ḥifẓ ad-dien*) yang seharusnya hak asuh anak itu diberikan kepada ibu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a): Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

²¹ Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), h. 70.

²² Lima unsur pokok di atas, dalam literatur-literatur hukum islam lebih dikenal dengan *Ushul al-Khamsah* dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tergugah untuk meneliti lebih lanjut tentang perkara *hadanah* seorang anak yang berumur 7 Bulan yang diberikan kepada bapaknya setelah perceraian kedua orang tuanya, dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Pengalihan Hak Asuh Anak Dari ibu ke Bapak Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr)”

Penulis memilih meneliti putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A karena pengadilan Agama Pekanbaru adalah salah satu di antara tiga Peradilan Khusus di Indonesia yang mempunyai wewenang menangani perkara perdata, dan Peradilan Agama Pekanbaru mempunyai integritas tinggi, pelayanan yang maksimal serta peringkat Klas 1 A berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2019, serta masyarakatnya dalam masa perkembangan dan taat hukum.

Penulis memilih meneliti *hadanah* anak yang belum mumayyiz, karena perkara *hadanah* adalah perkara yang aktual²³ dan menjadi permasalahan pasca perceraian, dan anak adalah harta yang paling berharga, apabila salah dalam mendidik anak atay salah dalam menetapkan pengasuh anak, maka kemudahan besar akan terjadi. penulis menggunakan maqasid

²³ Yaitu: bahwa masalah yang dipilih memiliki focus masalah yang actual up to date, kekinian/sering menjadi perbincangan, dan tidak basi di telan zaman. Disebut actual karena fokus masalah adalah sesuatu yang sedang/sering dihadapi oleh masyarakat. Burhan bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), Cet. Ke-8, h. 65.



syariah sebagai tinjauan dalam menetapkan hak asuh anak, karena maqasid syariah sangat mementingkan dan mencakup hak-hak manusia dalam pemeliharaan agama, diri/jiwa, akal, keturunan dan harta.

B. Batasan Masalah

Agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sehingga penelitian ini terpusat pada masalah yang menjadi objek penelitian. Maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pengalihan hak asuh anak dari ibu murtad ke bapak dalam perspektif maqasid syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1 A No. 1835 /Pdt. G /2018/PA. Pbr ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A dalam menetapkan hak asuh anak dalam perkara No. 1835 /Pdt. G /2018/PA. Pbr ?
3. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap putusan hakim No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1 A No. 1835 /Pdt. G /2018/PA. Pbr

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A dalam menetapkan hak asuh anak.
3. Untuk mengetahui tinjauan maqasid syariah terhadap putusan hakim No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr.

Adapun manfaat penelitian ini :

1. Salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang fiqh secara umum.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan baik di kalangan intelektual ataupun orang awam tentang hukum Islam.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan penelitian, maka tinjauan merupakan bagian yang signifikan dalam penyusunan karya ilmiah, untuk menjamin keaslian karya ilmiah dan mendemonstrasikan hasil bacaan yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Tinjauan hasil penelitian mengemukakan hasil penelitian yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian seperti teori, analisa, kesimpulan, keunggulan dan kelemahan pendekatan yang dilakukan orang lain dalam penelitian, maka penulis akan belajar dari tinjauan sebelumnya, untuk mengembangkan dan memperdalam serta menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama dibuat oleh peneliti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya.²⁴ Penulis menggunakan studi penelitian dengan mengumpulkan informasi dari objek *paper*.²⁵

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian penulis, sebagai berikut:

David Idrus Habibie mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul skripsi “*Tinjauan Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi Terhadap Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Murtad*” Dalam skripsi ini David Idrus Habibie menjelaskan secara umum tinjauan maqasid syariah terhadap ibu yang murtad.²⁶

Persamaan penelitian David Idrus Habibie dengan penelitian penulis terdapat pada pisau analisis dengan menggunakan maqasid syariah, namun perbedaannya David Idrus Habibie menjadikan maqasid syariah sebagai tinjauan terhadap ibu yang murtad sebagai pengasuh, hasil dari tinjauan ini adalah bahwa calon pemegang *haddanah* wajib mengupayakan kemaslahatan jasmani dan rohani anak sesuai kemampuannya, dan mengutamakan kemaslahatan rohani daripada kemaslahatan jasmani, *haddanah* lebih diprioritaskan pada wanita terutama ibu. Pengasuhan bagi anak yang belum *mumayyiz* (masih menyusui) bisa dilakukan oleh ibu murtad, karena kemaslahatan *daruriyah* bagi anak adalah *hifzu nafs* dan *hifzu aql*, dan *hifzu ad-Din* adalah sebagai *tingkatan hajiyyat* bahkan *tahsiniyat*. Sedangkan dalam

²⁴ Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 64.

²⁵ dokumen, buku-buku, majalah atau bahan tertulis lainnya, baik berupa teori, laporan penelitian, atau penemuan sebelumnya (findings).

²⁶ David Idrus Habibie, *Tinjauan Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi Terhadap Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Murtad*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.



penelitian penulis fokus pada putusan hakim Pengadilan Agama No. 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr yang menjadi pengasuh adalah yang bisa memberikan perlindungan rohani dan jasmani, namun lebih diprioritaskan pada pengasuh yang bisa memberikan perlindungan rohani/aqidah (*hifzu ad-Din*).

Mochamad Firdaos mahasiswa UIN Wali Songo Semarang dengan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Hadanah Ibu Murtad*” (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere No. 1/Pdt.G/2013/PA.Mur). Dalam Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan ibu murtad sebagai pemegang hak asuh anak yang notabene berbeda agama, penulisan skripsi ini menggunakan masalah mursalah sebagai tinjauan dalalam penetapan *hadanah* ibu murtad.²⁷

Persamaan Penelitian Mochamad Firdaos dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang penetapan *hadanah* karena akibat perceraian istri murtad. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada pertimbangan hakim, pada penelitian Mochamad Firdaos ibu yang murtad sebagai *hadanah*. Sedangkan pada penelitian penulis ayah sebagai *hadan* bagi anak yang belum *mumayyiz*.

Maulana Akbar mahasiswa IAIN Ponorogo dengan judul skripsi “*Hak hadanah Ayah Dalam Perpektif Maqasid Syariah*.” (Studi Analisi Putusan Terhadap Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0203/Pdt.G/2012/PA.YK.

²⁷ Mochamad Firdaos, “*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Hadanah Ibu Murtad*” (Analisi Putusan Pengadilan Agama Maumere No. 1/Pdt.G/2013/PA.Mur), Semarang: UIN Wali Songo, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Skripsi Maulana Akbar ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara *hadanah*, penelitian ini merupakan penelitian *field reseach* (penelitian lapangan), hasil penelitian ini menyatakan bahwa hakim pengadilan memberikan hak asuh kepada ayah karena aspek moral dan melihat kemaslahatan anak. Hak asuh anak diberikan kepada Ayah karena anak sudah nyaman dengan ayah, berbeda dengan apabila anak diberikan kepada ibu anak dikhawatirkan tidak terurus.²⁸

Persamaan penelitian Maulana Akbar dengan penelitian penulis terdapat pada objek kajiannya yaitu sama-sama meneliti *hadanah* dengan menggunakan pisau analisis *maqasid syariah* sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. adapun perbedaan, pada penelitian. Sedangkan penulis menggunakan data skunder hasilnya karena ibu murtad dan apabila ibu yang mengasuh, maka agama anak yang merupakan kebutuhan *daruriyat* dikhawatirkan. Meskipun ada persamaan dalam menggunakan pisau analisis, Maulana Akbar membatasi analisisnya yaitu dalam rangka *hifzu nafs*, *hifzu aql* dan *hifzu nasb*, sedangkan penulis meninjau pengalihan hak asuh anak dari ibu ke bapak dalam perspektif *maqasid syariah*, dalam rangka *hifzu dīn*, *hifzu nafs*, *hifzu aql*, *hifzu nasb* dan *hifzu mal* dengan menggunakan dalil al-Qur'an dan Sunnah serta pendapat ulama, sehingga putusan hakim pengadilan Agama memang sesuai.

²⁸ Maulana Akbar, *Hak Hadanah Ayah Dalam Perspektif Maqasid Syariah* (Studi Analisa Putusan Terhadap Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0203/Pdt.G/2012/PA.YK. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fachris Lutfi Rifqi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul, No. 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl Terhadap hak hadanah, dalam penulisan skripsi ini meneliti apa pertimbangan hakim dalam menetapkan sebagai hadin/hadinah, sehingga siapa yang paling berhak menjadi pengasuh anak diantara ayah dan ibu bahkan kerabat dekat.”*²⁸

Terdapat persamaan dalam penelitian antara Fachris Lutfi Rifqi dengan penelitian penulis, pengadilan sama-sama memberikan hak asuh anak kepada ayah, namun terdapat juga perbedaan yang sangat signifikan, dalam penelitian Fachris Lutfi Rifqi alasan ayah sebagai hadin karena ibu tidak bertanggung jawab terhadap anak berdasarkan Pasal 30 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sedangkan penelitian penulis ayah sebagai hadin karena ibu murtad.

Muhammad Agus mahasiswa IAIN Parepare, dengan skripsi berjudul *“Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perfektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”*, dalam penulisan skripsi ini membahas secara umum siapa yang berhak menjadi pengasuh dalam rangka menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani ditinjau berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata.²⁹

²⁸ Fachris Lutfi Rifqi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul, No. 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl Terhadap hak Hadanah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016. Lihat juga Jurnal V. 1, No.1 oleh Nisa’ Nur amalia, Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 3346/Pdt.G/2016/PA. Sby Tentang ayah sebagai pemegang hak asuh anak, Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah, 2018.*

²⁹ Muhammad Agus, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perfektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Parepare: IAIN Parepare, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan dalam penilitan ini dengan penelitian penulis yaitu, dalam penelitian Muhammad Agus meninjau berdasarkan hukum Islam dan hukum normatif siapa yang paling berhak dan apa indikator-indikator menjadi pengasuh, penelitian penulis juga meninjau siapa yang paling berhak menjadi pengasuh dalam studi kasus putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, namun lebih fokus dengan tinjauan maqasid syariah.

berdasarkan beberapa penelitian yang sudah di uraikan di atas, penulis tidak menemukan pengulangan judul atau pembahasan dengan penelitian penulis. Maka penulis akan lebih fokus terhadap pertimbangan hakim pengadilan Agama Pekanbaru No. 1835 /Pdt. G /2018/PA. Pbr mengenai pengalihan hak asuh anak dan bagaimana jika ditinjau berdasarkan maqasid syariah.

F. Metode Penelitian

Adapun untuk metode penelitian tugas akhir kuliah (Skripsi) ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yaitu hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁰

³⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet ke 1, h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1835/Pdt.G/2018/PA. Pbr mengenai hak asuh anak.

3. Sumber Data

Berdasarkan kualitas kepentingan data dalam mendukung keberhasilan penelitian, data dapat dikategorikan dalam dua kategori yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian atau istilah lain data yang utama. Data sekunder juga diperlukan dalam penelitian, tetapi berperan sebagai data pendukung yang fungsinya menguatkan data primer.³¹ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dari kedua sumber tersebut yaitu:

- a. Data primer yaitu: yaitu: Salinan putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A No. 1835/Pdt.G/2018/PA. Pbr mengenai hak asuh anak.
- b. Data sekunder, yaitu: kamus, ensiklopedia Islam dan buku-buku fikih yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

³¹ Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Cet. Ke-2, h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk metode pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama oleh peneliti adalah:

- a. Mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Membaca dan meneliti data-data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin.
- c. Mencatat secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti begitu diperlukan karena manusia memiliki ingatan yang sangat terbatas.

5. Analisis Data

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode Kualitatif, yaitu setelah Penulis mengumpulkan data kemudian melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan, selanjutnya diambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang akan diteliti.

6. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deduktif

Dengan metode ini, penulis memaparkan data- data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Deskriptif

Dengan metode ini penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data- data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Supaya lebih terarah pembahasan penelitian ini, maka penulis memuat sistematika berdasarkan bab. Penulis menjadikan penelitian ini dalam lima bab, masing – masing terdiri dari sub bab yang merupakan penjelas dari bab tersebut.

Bab I

Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II

Tinjauan Umum Peradilan dan Putusan

Pada bab ini memuat tentang Pengertian Peradilan Agama, Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia, Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia, Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia, Kewenangan Hakim Pengadilan Agama di Indonesia, Klasifikasi Peradilan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama di Indonesia, Sejarah Singkat Peradilan Agama Pekanbaru.

Putusan Pengadilan Agama di Indonesia, Pengertian Putusan dan Asas Putusan, Macam-macam Putusan, Otonomi Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan, Hakim Melakukan Contra Legem, Kedudukan Putusan Pengadilan Agama di Indonesia.

Bab III

Tinjauan umum tentang *ḥadd* dan *maqasid syari'ah*

Pada bab ini memuat tentang definisi *ḥadd*, dasar hukum *ḥadd*, pihak-pihak yang berhak atas *ḥadd*, urutan pemegang *ḥadd*, syarat-syarat *ḥadd*, upah *ḥadd* dan masa *ḥadd*.

Pengertian *maqasid syari'ah*, sejarah *maqasid syari'ah* tujuan dan klafikasi *maqasid syari'ah*.

Bab IV

Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini memuat pembahasan putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, pertimbangan hukum hakim dan tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1835/pdt. G/2018/PA.

Bab V

Berisi penutup.

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA

I. PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

A. Pengetian Peradilan Agama

Lembaga Peradilan Agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.³²

Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.³³

³² Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 12-13.

³³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2003, h. 5.

B. Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia

Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer, dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 12 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa susunan, kekuasaan serta acara badan-badan peradilan diatur dalam Undang-undang tersendiri. Khusus mengenai Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989.³⁴

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus mengenai bagi Provinsi Daerah Istimewa

³⁴ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 7-8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, maka diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan Undang-undang tersebut diikuti dengan perubahan Undang-undang yang mengatur badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, sedangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Undang-undang tentang perubahan kedua lingkungan peradilan tersebut disahkan pada tanggal 29 Maret 2004. Namun belum terjadi perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³⁵

C. Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia

Sebelum Islam masuk dan dianut oleh masyarakat Indonesia, sebagian besar masyarakat memeluk agama Hindu. Dan pada waktu itu,

³⁵ Musthofa, *Op. Cit.* h. 7-8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kehidupan masyarakatnya telah di kenal adanya dua macam peradilan,³⁶ yakni:

- a. Peradilan Pradata, yakni suatu peradilan yang tugas dan kewenangannya mengurus dan menangani perkara-perkara yang menjadi urusan raja.
- b. Peradilan padu, yakni suatu peradilan yang tugas dan kewenangannya mengurus dan menangani perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja.

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak Islam itu sendiri ada di bumi Indonesia pada abad ke tujuh atau kedelapan masehi,³⁷ dengan tingkat tahapan dan bentuknya sebagaimana ditentukan oleh hukum islam.

Ketika colonial Belanda mulai memasuki Indonesia melalui VOC, yakni sebuah wadah dagang yang telah mengarahkan sasarannya untuk menjajah Nusantara, tidak dapat menyepelekan eksistensi Hukum Islam yang telah berurat akar dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia. Meskipun VOC semakin kokoh mencengkeram dan bahkan selanjutnya menjajah Nusantara ini, tidak mampu menekan dan membendung pelaksanaan Hukum Islam yang menjadi keyakinan hidup upaya menghapuskan Hukum Islam

³⁶ Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1977), h. 16.

³⁷ Hamka, *Sejarah Umat Islam*, jilid III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 35.



sama sekali yang dilakukan secara terus menerus hanya mampu pada bidang pidana.³⁸

Pada tanggal 29 Desember 1989, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama³⁹. Hal ini merupakan puncak dari kekokohan dan kemapanan Badan Peradilan Agama. Sebagai Peradilan Negara di bumi Indonesia. Pengadilan Agama sudah tidak lagi harus menggantungkan kepada Pengadilan Negeri.

D. Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia

Kedudukan Peradilan Agama dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Dan sebagai badan Peradilan khusus sebagaimana halnya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakannya adalah dikhususkan untuk rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.⁴⁰ Yang pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan sama sekali daripada hukum agamanya yaitu hukum Islam.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Badan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Tinggi Agama dan tugas pokok untuk menerima, memeriksa,

³⁸ Lihat, Asa, *Sejarah Peradilan Agama*, (Jakarta: Serial Media Dakwah, 1989), h. 2.

³⁹ Undang-undang Peradilan No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴⁰ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya kedua jenis Pengadilan ini berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tinggi.⁴¹

E. Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia

Kata “kekuasaan” di sini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “competentie”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.

Berbicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.⁴²

1) Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan Pengadilan Agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

⁴¹ Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 3.

⁴² *Ibid*, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota dan satu kabupaten.

Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya.⁴³

2) Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, misalnya: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi.⁴⁴

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan, apakah termasuk kekuasaan absolut atau bukan. Kalau jelas-jelas bukan kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi absolut”

⁴³ *Ibid*, h. 25-27.

⁴⁴ *Ibid*, h. 27-28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau tingkat kasasi.⁴⁵

a) Jenis Perkara Yang Menjadi kekuasaan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” di sini maksudnya kekuasaan absolut. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kekuasaan absolut tersebut sering disingkat dengan kata “kekuasaan” saja. Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 , yang berbunyi:

Pasal 49

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, Wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah⁴⁶
 - d. Ekonomi Syari’ah.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 271.

⁴⁷ Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 689-690.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.⁴⁸
- 3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut.⁴⁹

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.⁵⁰

⁴⁸ Izin beristeri lebih dari satu orang, Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, Dispensasi kawin, Pencegahan perkawinan, Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Pembatalan perkawinan, Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri, Perceraian karena talak, Gugatan perceraian, Penyelesaian harta bersama, Mengenai penguasaan anak (*H}ad}a>nah*), Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya, Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri, Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak, Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, Pencabutan kekuasaan wali, Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal ke dua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan, kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, Penetapan asal usul seorang anak, Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 197.

⁴⁹ *Ibid*, h. 28-29.

⁵⁰ *Ibid*, h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006 ditentukan, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.⁵¹ Di antaranya ialah perkara Perkawinan Terkait dengan tema penelitian yang substansinya membahas tentang pembatalan perkawinan, dan akhirnya menyebabkan perebutan hak asuh anak.

F. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama di Indonesia

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka hakim harus memahami ruang lingkup, tugas, dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.⁵²

Dengan demikian tugas hakim dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Tugas pokok dibidang peradilan (teknis Yudisial) di antaranya:
 - a) Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

⁵¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 54.

⁵² Magono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2019), h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - d) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.
- 2) Tugas yuridis, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga-lembaga negara apabila diminta.
 - 3) Tugas akademis/ilmiah, yaitu dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵³

G. Klasifikasi Peradilan Agama di Indonesia

Sebagaimana penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2019, untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka meningkatkan kinerja pengadilan perlu diatur kembali kriteria klasifikasi Pengadilan tingkat pertama.

Klasifikasi adalah tingkatan kelas Pengadilan di lingkungan Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁵⁴ Dalam penentuan kriteria klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama di tetapkan berdasarkan dua unsur:

⁵³ *Ibid*, h. 69.

⁵⁴ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 74A/KMA/SK/IV/2019 mengenai kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Unsur Sunsantif

Unsur sunsantif terdiri dari jumlah: Perkara cerai gugat,⁵⁵ presentase cerai gugat,⁵⁶ perkara cerai talak,⁵⁷ presentase perkara cerai talak,⁵⁸ dan presentase selain dari perkara cerai talak dan cerai gugat.⁵⁹

b. Unsur penunjang

Unsur penunjang terdiri dari: Sub unsur penduduk,⁶⁰ sub unsur kemudahan akses,⁶¹ sub unsur penerapan Refomasi Birokrasi,⁶² dan sub unsur letak pengadilan.⁶³

Berikut ini akan penulis jelaskan sejarah singkat salah satu Peradilan yang mempunyai kriteria Klasifikasi klas 1 A yang ada di Riau.

⁵⁵ Perkara gugatan yang di ajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak istri.

⁵⁶ Jumlah perkaa cerai gugat yang di selesaikan tepat waktu dibagi jumlah Perkara Cerai gugat yang diselesaikan (tahun bejalan) di kali 100 pesen.

⁵⁷ Permohonan ijin talak yang di ajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak suami.

⁵⁸ Jumlah perkaa cerai talak yang di selesaikan tepat waktu dibagi jumlah Perkara Cerai talak yang diselesaikan (tahun bejalan) di kali 100 pesen.

⁵⁹ Ijin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan, wasan, hibah, wakaf, shodakoh, ekonomi syariah.

⁶⁰ Jumlah penduduk yang beragama Islam berada di wilayah peradilan.

⁶¹ Tingkat kemudahn atau kesulitan transpotasi dari dan Pengadilan.

⁶² Upaya untuk melakukan pembubaran dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan terutama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keafadilan.

⁶³ Letak/lokasi Pengadilan di ibukota Provinsi, ibukota kabupaten/kota atau terletak di ibukota. Lihat, Putusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 74A/KMA/SK/IV/2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Sejarah Singkat Peradilan Agama Pekanbaru Klas 1A

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syari'ah* diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 No.99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syari'ah* di Sumatera. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah *Syari'ah* Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.⁶⁴

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa 'Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syari'ah* Pekanbaru K.H. Abdul Malik, anggota Mahkamah *Syari'ah* Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah *Syari'ah* Bukittinggi, Bapak K.H. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah *Syari'ah* Pekanbaru.

Dengan dilantiknya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah *Syari'ah* Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan

⁶⁴ Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A, di ambil pada hari Rabu tanggal 2 September 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 tahun.⁶⁵

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah *Syari'ah* Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru

⁶⁵ Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan se Wilayah Riau*, Pekanbaru. T.p., 1995, h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.⁶⁶

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988–1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H. (1994–1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998–2001), Drs. Zein Ahsan (2001–2004), Drs. Harun S, S.H. (2004–2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. ((2006– 2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007 –2009), Drs. Taufik Hamami (2009–2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2010–2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012–2015), Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015 – 2019) dan Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (2019 - sekarang).

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru. Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.

⁶⁶ Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A, di ambil pada hari Rabu tanggal 2 September 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naïf, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama kedalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.⁶⁷

Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.

⁶⁷ Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru se Wilayah Riau*, Pekanbaru, t.p.,1995, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kelas 1a Pekanbaru yang bersih dan bermartabat menuju Pengadilan Agama yang agung dibawah lindungan Allah SWT”

MISI

1. Menjaga Kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1a.
2. Memberikan pelayanan hukum prima kepada masyarakat yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a.⁶⁸

I. Struktur Ketenagaan PA Pekanbaru⁶⁹

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Ketua	1	
2	Wakil Ketua	-	
3	Hakim	19	
4	Panitera	1	

⁶⁸ Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru, di ambil pada hari rabu tanggal 2 September 2019.

⁶⁹ Sumber: Kesekretariatan Pengadilan Agama Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Sekretaris	1	
6	Panmud	3	
7	Kasubbag	3	
8	Panitera Pengganti	13	
9	Jurusita	5	
10	Jurusita Pengganti	5	
11	Fungsional Umum	5	
12	Honoror	14 ⁷⁰	

Bertitik tolak dari visi Pengadilan Agama Pekanbaru yang merupakan derivasi dari misi Mahkamah Agung, maka misi Pengadilan Agama Pekanbaru juga sejalan diderivasi dari misi Mahkamah Agung, sehingga misi Pengadilan Agama Pekanbaru rumusannya sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru;
2. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru.

⁷⁰ Published: Monday, 10 April 2017 10:49 | Written by Super User | Print | Email | Hits: 673.



Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Pengadilan Agama Pekanbaru

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi dari struktur Organisasi

Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A, sebagai berikut:⁷¹

1. Ketua
 - a. Melakukan peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektifitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama kelas 1a Pekanbaru.
 - b. Mewujudkan aparatur Pengadilan agama kelas 1A Pekanbaru yang professional, bersih, berwibawa, dan berakhlakul karima
 - c. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan public di bidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Wakil Ketua
 - a. Menyelesaikan perkara banding yang diserahkan kepadanya
 - b. Membantu ketua dalam melaksanakan eksaminasi putusan/penetapan Hakim dan putusan
 - c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dalam menghimpun kajian tim
3. Hakim
 - a. Meneliti, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diserahkan kepadanya
 - b. Menyelesaikan minutas
 - c. Melaksanakan tugas sebagai Hakim pengawas bidang
4. Penitera/Sekretaris

⁷¹ Profil yayasan Pengadilan Agama Pekanbaru, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi kesekretariatan dan kepaniteraan
 - Mengkordinir dan mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berjalan sesuai dengan ketentuan/prosedur dan rencana kerja yang telah ditetapkan
- b. Kordinasi dan kepengawasan kegiatan kepaniteraan
 - Mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada panitera muda, penitera pengganti, agar perkara terdistribusi dan tertangani dengan baik.
 - Mengkordinasi penyiapan surat-surat pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berperkara agar semua pihak mengetahui bahwa perkara bandng yang di ajukan sudah diterima dan sedang diselesaikan di Pengadilan Agama kelas 1A Pekanbaru.⁷²
- c. Pembinaan staf.
 - Memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada seluruh staf dibawahnya untuk memastikan dimilikinya pemahaman yang efektif atas tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan meningkatkan kompetensi staf secara kontinu sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.⁷³

⁷² *Ibid.*

⁷³ Profil yayasan Pengadilan Agama Pekanbaru, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wakil penitera
 - a. Kordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi
 - Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kepaniteraan yang efektif dan melaporkannya kepada atasan.
 - Membagi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum
 - b. Kordinasi dan pengawasan kegiatan kepaniteraan
 - Mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada panitera Muda dan Panitera Pengganti agar Perkara terdistribusi dan tertangani dengan baik.
 - Membantu tugas Hakim Pengawas Bidang.
 - c. Pembinaan staf.
 - Memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada seluruh staf dibawahnya untuk memastikan dimilikinya pemahaman yang efektif atas tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan meningkatkan kompetensi staf secara kontinu sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
6. Panitera Muda Pengganti
 - a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan daftar isi bundle A yang diserahkan kepalanya.
 - b. Menerima, mencatat, memberi nomor register, menyiapkan berkas perkara banding ke dalam buku register serta memberi catatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

singkat tentang isinya kepada ketua Majelis di Kepaniteraan Muda Gugatan

- c. Berkas perkara yang telah register dilengkapi dengan formulir prnrtapan majlis hakim dan selanjutnya disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada ketua PA 1A Pekanbaru.⁷⁴

7. Panitera Muda Hukum

- a. Menerima, mencatat, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar sub Bidang Kepaniteraan Muda Hukum.
- b. Mengumpulkan, mengelolah dan mengkaji data perkara serta membuat statistik perkara pada tingkat pertama
- c. Menyusun arsip perkara banding menurut pola bindalmin

8. Panitera Pengganti

- a. Mencatat jalannya siding dan bertanggung jawab atas kebenaran catatn siding berdasarkan sumpah jababan panitera pengganti
- b. Melengkapi segala yang terjadi yang berkaitan dengan para pihak selama dalam persidangan dalam bentuk berita acara
- c. Menandatangani berita acara persidangan bersama dengan ketua majlis

9. Wakil Sekretaris

- a. Mengkordinasi ketertiban, kebersihan kantor, disiplin kerja pegawai serta urusan kerumahtanggaan kantor lainnya.

⁷⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepegawaian, keuangan dan umum serta inventaris barang milik Negara dan administrasi lainnya
- c. Melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen penanggung jawab kegiatan sesuai dengan kegiatan yang berlaku

10. Kasubbag Kepagawaian

- a. Menyelenggarakan administrasi dibidang kepegawaian
- b. Menerima, mencatat, mengolah dan menyalurkan surat-surat masuk dan surat-surat keluar
- c. Menyiapkan daftar hadir, daftar jam istirahat, dan daftar pulang pegawai pengadailan Agama Pekanbaru

11. Kasubbag Umum

- a. Menyelenggarakan adminitrasi di bidang umum
- b. Melaksanakan tata persuratan, pemberdayaan staf dan menjaga lingkungan kantor seusia bidang sub umum
- c. Membuat perencanaan pengadaan barang inventaris dan alat kebutuhan kantor

12. Kasubbag Keuangan

- a. Menyelenggarakan adminitrasi di bidang keuangan
- b. Membuat anggaran perencanaan PA pekanbaru
- c. Memonitor pembukaan keuangan yang berhubungan dengan keuangan APBN, urusan gaji, tunjangan pegawai dan perjalanan dinas.⁷⁵

⁷⁵ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1) Fungsi mengadili (*Judicial power*)

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

2) Fungsi pembinaan,

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *yudicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3) Fungsi pengawasan,

yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).⁷⁶

4) Fungsi nasehat,

yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun2009).⁷⁷

II. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA

A. Pengertian dan Asas Putusan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

⁷⁶Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru, di ambil pada hari rabu tanggal 2 September 2019.

⁷⁷*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di PN, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.⁷⁸ Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan dikemukakan berbagai segi yang berkaitan dengan putusan.

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa salah satu wewenang hakim adalah menetapkan putusan. Oleh karena itu, hakim Pengadilan harus mengetahui asas yang mesti di tegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat.⁷⁹ Asas tersebut dijelaskan dalam 178 HIR, pasal 189 RGB, dan pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004.

1. Memuat Dasar Alasan yang jelas dan Rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan.
- hukum kebiasaan.

⁷⁸ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung, Bina Cipta, 1977), h. 122.

⁷⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 889.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- yurisprudensi, atau
- doktrin hukum

Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

2. Wajib menggali Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua, digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RGB, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengidili setiap gugatan yang di ajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan sebagiannya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang di gariskan Undang-undang.

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas selanjutnya, digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RGB dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut *ultra petitum partiulam*. hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus di nyatakan cacat (*invlid*) meskipun hakim melakukan itu dengan i'tikaq baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.⁸⁰

4. Diucapkan di Muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Menurut asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal sampai akhir. Dengan demikian prinsip peradilan terbuka untuk umum dari awal pemeriksaan sampai putusan di jatuhkan, merupakan bagian dari asas *fair trial*.⁸¹

B. Macam-macam putusan Pengadilan Agama di Indonesia

Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, putusan ada 2 macam, yaitu putusan akhir,⁸² dan putusan sela,⁸³ sedangkan ditinjau dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan diatuhkan,

⁸⁰ *Ibid*, h. 890-894.

⁸¹ *Ibid*.

⁸² Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan dipersidangan, baik yang telah melaui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Putusan akhir juga bearti putusan yang dijatuhkan sebelum sampai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan dibagi menjadi kedalam 3 macam, yaitu: putusan gugur,⁸⁴ putusan verstek,⁸⁵ dan putusan kontradiktoir.⁸⁶ Jika dilihat dari segi isinya terhadap gugatan ada 2 macam yaitu: putusan positif, dan putusan negatif.⁸⁷ Bila dilihat dari sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan maka putusan dibagi menjadi 3 macam yaitu: putusan declaratoir,⁸⁸ putusan constitutif,⁸⁹ dan putusan condemnatoir.⁹⁰

tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, seperti putusan gugur, putusan verstek yang tidak diajukan verzet, putusan tidak menerima dan putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa. Semua putusan akhir dapat dapat dimintakan banding, kecuali undang-undang menentukan lain.

⁸³ Putusan sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan sela tidak mengikat hakim. Bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan.

⁸⁴ Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau pemohon tidak hadir. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan atau permohonan. A. Makti Arto, *Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 246.

⁸⁵ Putusan verstek merupakan kebalikan pengguguran gugatan yakni sebagai hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang ditentukan. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Peridangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2017), h. 972

⁸⁶ Putusan Kontadiktoir adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan atau diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak. Dalam pemeriksaan/ putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan ini dapat dimintakan banding. A. Makti Arto, Op., Cit, h. 251

⁸⁷ Putusan positif ialah apabila hakim telah memeriksa pokok perkara, sehingga putusannya bisa berupa mengabulkan dan bisa menolak. Sedangkan putusan negatif ialah apabila hakim belum memeriksa pokok perkara yakni bosa NO atau tidak bewenang mengadili.

⁸⁸ Putusan Declaratoir adalah putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu pada pengakuan sesuatu hak atas prestasi tertentu dan umumnya putuasan model ini terjadi dalam lapangan hukum pribadi misalnya tentang pengangkatan anak, tentang kelahiran, tentang kelahiran, tentang penegasan hak atas suatu benda.

Putusan declaratoir biasanya bersifat menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa. Jadi fungsinya adalah sebagai



C. Otonomi Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan

Pengadilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, merupakan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Anggota masyarakat dilarang menempuh sistem main hakim sendiri.

Dalam bidang perdata pihak yang bersengketa dibenarkan menyelesaikan melalui perdamaian atau arbitrase sebagai *extra judicial*. Namun apabila hal itu tidak ditempuh, cara penyelesaian mesti dilakukan melalui sistem penegakan hukum yang resmi (*formal law enforcement system*) di forum badan peradilan yakni pada pengadilan negara. Tidak ada badan lain yang memiliki wewenang menyelesaikan sengketa, selain daripada pengadilan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Sebagaimana diubah dengan UU Mo. 3 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. Semua

penegakan saja dari suatu keadaan yang sudah ada, atau keadaan yang sudah tidak ada. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta; Kencana, 2008), h. 297.

⁸⁹ Putusan konstitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru. Misalnya, putusan tentang pembatasan suatu perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan, dan lain-lain.

Dalam putusan konstitutif biasanya tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan, karena dengan diucapkannya putusan itu, sekaligus keadaan hukum yang lama terhenti dan timbul keadaan hukum baru. *Ibid.* h. 298.

⁹⁰ Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang diterapkan oleh hakim. *Ibid.* h. 298.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan yang ada di wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara yang ditetapkan dalam Undang-undang.⁹¹

1. Pengadilan Sebagai Pelaksana Penegak Hukum

Pengadilan atau hakim merupakan pelaksana penegak hukum. Dalam kedudukan yang demikian, ada dua fungsi pokok yang mesti diperankannya.

a. Sebagai Penjaga Kemerdekaan Anggota masyarakat.

Hakim berfungsi dan berperan menjaga kemerdekaan anggota masyarakat (*In guading the freedom of society*) dalam arti luas:

- Mengembangkan nilai-nilai HAM dalam segala bidang sebagai ideologi universal atau ideologi global.

Oleh karena itu. Hakim sedapat mungkin di tuntut dapat memahami dan menerapkan semua nilai-nilai HAM. Dalam berbagai generasi seperti:⁹²

- (1) Deklarasi HAM Semesta yang dicetuskan PBB (1994)
- (2) Konpensi Hak Sipil dan Politik, 1996.
- (3) Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, 1996.

⁹¹ Yahya Harahap, *Op. Cit*, h. 894-895.

⁹² *Ibid*, h. 951.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Deklarasi Hak Atas Pembangunan yang dikeluarkan Sidang Umum PBB, 1986.

Masih banyak lagi bentuk konvensi maupun deklarasi di bidang HAM yang perlu mendapat perhatian hakim, seperti dibidang pembangunan, perlindungan anak. Perempuan, perburuhan, dan sebagainya.

2. Kebebasan Tidak Bersipat Mutlak

Sering terjadi kekeliruan memahami makna kebebasan peradilan, sehingga peradilan melalui hakim melakukan pelanggaran batas kewenangan. Seolah-olah kebebasan itu dimaknai tanpa batas, yang mengakibatkan hakim itu identik peradilan dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, para pihak yang berpekara di depan sidang pengadilan, bukan berhadapan dan bertarung dengan hukum, tetapi berhadapan dan bertarung dengan hakim. Perilaku yang demikian, menempatkan peradilan dan hakim di atas hukum, sehingga penyelesaian dan putusan yang dijatuhkan bukan menurut hukum, tetapi menurut selera dan kemauan hakim. Kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut:⁹³

- a. Mutlak Bebas dan Merdeka dari Campur Tangan Ekstra Yudisial

Perhatikan Penggarisan Penjelasan Pasal 1 UU No. 4 Tahun

204 alinea pertama yang berbunyi:

⁹³ *Ibid*, h. 952.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

Berdasarkan penjelasan di atas, sepanjang yang berkenaan pelaksanaan fungsi pengadilan, hakim bertindak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Oleh karena itu, Undang-undang ditempatkan pada posisi yang bebas secara mutlak dari campur tangan ekstra yudisial. Dengan demikian:

- Secara absolut bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya.
 - Mutlak bebas dan merdeka dari segala bentuk paksaan, direktiva, dan rekomendasi dari pihak manapun.
 - Bahkan mutlak bebas dan merdeka dari campur tangan, paksaan, direktiva, maupun rekomendasi dari pengadilan yang lebih tinggi.
- b. Kebebasan Relatif Menerapkan Hukum

Untuk memahami permasalahan ini, merujuk kepada Penjelasan Pasal 1 alinea kelima UU No. 14 Tahun 1970, diubah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan UU No.35 Tahun 1999 dan sekarang pada penjelasan Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi:⁹⁴

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum keadilan berdasar Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Hanya dalam batas ini kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam melaksanakan penerapan hukum. Tujuan pemberian kebebasan yang terbatas dan relatif itu, agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum, tidak mutlak tanpa batas, tetapi terikat pada patokan yang benar-benar mengacu pada penggarisan penjelasan Pasal 1 di atas, melalui langkah-langkah berikut.

- (1) Hakim Terikat Mengutamakan Penerapan Ketentuan Undang-Undang.

Inilah patokan pertama yang mesti dipegang dan dilaksanakan hakim. Dia harus mencari, menemukan, dan menentukan apakah ada ketentuan undang-undangnya ada, lebih lanjut hakim menganalisis, apakah:

⁹⁴ Ibid, h. 954.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rumusan pasal yang hendak diterapkan itu jelas dan rinci yakni defenisinya terang dan maknanya juga jelas,
- Apakah ketentuan pasal undang-undang yang hendak diterapkan itu memiliki potensi melindungi kepentingan umum atau tidak menimbulkan perkosaan dan ketidakpatutan yang tidak sesuai dengan peradaban dan kemanusiaan.⁹⁵

D. Hakim Boleh Melakukan *Contra Legem*

Apabila ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem* yakni mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan.

Pengertian *contra legem*, melanggar larangan yang ditentukan dalam pasal Undang-undang tertentu dengan cara menyingkirkan penerapan pasal itu. Bukan menyatakan Undang-undang yang bersangkutan tidak sah, tetapi hanya mengesampingkan penerapan pasal tertentu dari Undang-undang tersebut. Berbaringan dengan itu, hakim mencipta hukum kasus yang berlawanan arah dengan apa yang dikehendaki pasal yang bersangkutan.

Kalau begitu, jika hakim bermaksud melakukan *contra legem*, mesti mampu mengemukakan dasar-dasar pertimbangan yang rasional,

⁹⁵ *Ibid.*



bahwa pasal yang disingkirkan itu bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, sehingga kalau pasal itu diterapkan akan menimbulkan keresahan dan ketidakpatutan.⁹⁶

E. Kedudukan Putusan Pengadilan Agama di Indonesia

Bila dilihat dari kekuatan putusan hakim, maka putusan hakim mempunyai kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian.⁹⁷

Kekuatan mengikat artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan pihak yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan. Mengikat disini dalam dua pengertian, yaitu dalam pengertian positif dan negatif. Mengikat dalam arti positif adalah bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*), dan tidak dimungkinkan pembuktian lawan. Sedangkan mengikat dalam arti negatif adalah bahwa hakim tidak boleh memutuskan lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nabis in idem*).⁹⁸ Oleh karena keputusan yang berbentuk putusan mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak, kepada orang yang mendapat hak dari mereka, para pihak mesti tunduk mentaati putusan. Pihak yang satu dapat menuntut pemenuhan putusan

⁹⁶ Ibid, h. 956, Lihat, M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem, Peadilan dan Penyelesaian Sengketo*, h. 449.

⁹⁷ A. Makti Arto, *Op. Cit*, h. 264.

⁹⁸ Ibid.



kepada pihak lain. Keinginan untuk memenuhi dan mentaati dapat menimbulkan akibat hukum.⁹⁹

Kekuatan pembuktian berarti bahwa putusan hakim telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Putusan hakim menjadi bukti bagi kebenaran sesuatu yang termuat didalamnya. Sejalan dengan sifat kekuatan mengikat yang melekat pada putusan pengadilan, dengan sendirinya, menurut M. Yahya Harahap, melekat pula kekuatan pembuktian yang menjangkau para pihak yang berperkara, orang yang mendapat hak dari mereka, dan ahli waris mereka. Maksudnya, kapan saja timbul sengketa di kemudian hari dan sengketa perkaranya berkaitan langsung dengan apa yang telah tercantum dalam putusan.

Putusan yang memiliki kekuatan pembuktian dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk melumpuhkan gugatan pihak lawan. Nilai kekuatan pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat “sempurna” (*volleding*), “mengikat” (*bindede*), dan “memaksa” (*dwingend*). Bahkan dalam putusan tersebut melekat unsur *nebis in idem* sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1917 KUHPerdara.¹⁰⁰

⁹⁹ M. Yahya Harahap, *kedudukan, kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), Cet. ke- II, h. 345.

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 346.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

HADANAH DAN MAQASID SYARIAH

I. HADANAH

A. Pengertian Hadanah

Pemeliharaan pada dasarnya adalah kewajiban kedua orang tuanya. Baik dalam masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan segala hal yang dibutuhkan oleh anak. Dalam agama Islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadanah*. Secara etimologi *hadanah* berasal dari kata, *hadana* (), *Yahdunu* (يَحْضُنُ), *hadnan* (), *ihdāna* (), *hadnatun* (), *hawadn* (), yang artinya mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak.¹⁰¹ Sedangkan secara terminologis yang dimaksud dengan *hadanah* adalah kegiatan mengasuh memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹⁰²

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹⁰³

Dalam buku *Subul as-Salam* *hadanah* berasal dari kata () dengan kasroh huruf "ha" adalah mashdar dari kata () *hadanah* yang artinya dia mengasuh atau memelihara bayi. Maksudnya *hadanah wa hddanah* yaitu

¹⁰¹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), cet. Ke-2, hal. 104.

¹⁰² Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 119.

¹⁰³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 285.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asuhan atau pemeliharaan, () dengan kasroh huruf “ ha” juga berarti bagian badan mulai dari bagian bawah ketiak hingga bagian antara pusat dan pertengahan bagian punggung diatas panggul paha, termasuk dada atau dua lengan atas dan bagian antara keduanya.¹⁰⁴ Jadi dapat disimpulkan *hadanah* mempunyai arti antara lain: memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum *mumayyiz*.

Muhammad Suhain Suhaibi menjelaskan dalam kitabnya *Al-Syari'ah al-Islamiyah* *hadanah* adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri.¹⁰⁵

Dalam kajian fiqih *hadanah* yaitu memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang merusaknya.¹⁰⁶ Hal ini dirumuskan garis hukumnya dalam Pasal 41 UU Perkawinan sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

¹⁰⁴ Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, (Bandung: Darus Sunnah, 2012), h. 227.

¹⁰⁵ Muhammad Suhain Suhaibi, *Al-Syari'ah al-Islamiyah* Dirasah Muqaranah Baina Mazahib Ahl Alsunna wa Al Mazahab al-Ja'fariyah, (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah, 2000), h. 398.

¹⁰⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusan.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁰⁷

Garis hukum yang terkandung dalam pasal 41 Undang-undang tersebut, tampak tidak membedakan antara tanggung jawab yang mengandung nilai nonmaterial. Undang-undang perkawinan penekanannya berfokus pada nilai materilnya, sedangkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang penekanannya meliputi kedua aspek tersebut, yaitu sebagai berikut:

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

¹⁰⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (Jogyakarta: Laksana, 2013), h. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut, tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu masih kecil maka pemeliharanya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya.

Para ulama fiqih mendefinisikan *hadhan* sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan ataupun yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹⁰⁸

Yang dimaksud dengan kata mendidik adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayyiz*, maka istrinya lah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Dalam waktu itu si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Meskipun si anak tinggal bersama ibunya, namun nafkahnya tetap wajib dipikul oleh ayahnya.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 426.

¹⁰⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam buku Terjemah Khulashah *Kifayatul Akhyar* karangan Drs.Moh. Rifa'i dkk dijelaskan apabila antara ayah dan ibu berpisah dan mempunyai anak, maka ibulah yang lebih berhak memeliharanya (mendidiknya) sampai anak berumur 7 tahun, artinya bisa memilih orang tua di dikuti.¹¹⁰

Menurut fuqaha, *hadanah* adalah aktifitas untuk menjaga laki-laki dan perempuan atau orang idiot yang tidak *mumayyiz* dan tidak mandiri, serta aktivitas untuk kemaslahatan anak-anak, menjaga dari segala sesuatu menyakiti dan membahayakan, mendidik, jiwa, raga dan akal nya agar dia bisa bangkit dalam menghadapi realitas kehidupan dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara baik.¹¹¹

Wahbah Zuhaili dalam Fiqih Imam Syāfi'ī menjelaskan *hadanah* adalah mengasuh anak yang belum *mumayyiz* dan belum mampu mengerjakan urusannya secara mandiri, seperti merawat dirinya, mandi, mencuci baju serta menjaga diri bahaya. Pengasuhan termasuk dari bagian perwalian dan pengasuhan termasuk dari bagian perwalian dan pengasuhan. Namun, dalam hal ini lebih diutamakan kaum perempuan karena mereka lebih lembut, sayang, pendidik, lebih ulet, merawat dan lebih akrab terhadap anak yang diasuh.¹¹² Ulama fiqih menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita, karena naluri kewanitaannya mereka lebih

¹¹⁰ Moh. Rifa'I dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toba Putra, 1978), h. 350.

¹¹¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 21.

¹¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I*, alih bahasa oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta Timur: almahira, 2010), h. 65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibandingkan kesabaran seorang laki-laki.¹¹³

Senada dengan pendapat di atas, Sulaiman Rasjid menyatakan bahwa *hadanah* atau mendidik berarti menjaga, memimpin dan mengatur segala yang anak-anak belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Sedangkan Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah menjelaskan bahwa definisi *hadanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz* tanpa perintah darinya, menyediakan segala sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab.¹¹⁴

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, *hadanah* adalah merupakan aktifitas mengasuh anak kecil laki-laki ataupun perempuan yang belum *mumayyiz* ataupun sudah *mumayyiz* tetapi tidak dapat berdiri sendiri, artinya tidak dapat mengurus dirinya, dikarenakan kurangnya kecerdasan (idiot), *Hadanah* pada dasarnya hak seorang ibu, karena ibu dianggap lebih lembut naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibandingkan kesabaran seorang laki-laki.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Alih bahasa oleh Mohammad Tholib, (Bandung: PT. al-Maarif, 1980), cet. Ke-8, h. 173



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Dasar Hukum *Haddanah*

Orang tua mempunyai tanggung jawab memelihara dan mendidik anak dengan baik, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya serta melindungi dari bahaya kebinasaan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah ‘Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman untuk memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. Adapun dasar hukumnya yang menunjukkan kewajiban pemeliharaan anak (*Haddanah*)

firman Allah Subh^{anahu} wa Ta’ala> dalam al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia. (QS. at-Tahjim [66]: ayat 6)¹¹⁵

Dalam ayat ini Allah ‘Azza wa Jalla memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan semua perintah-perintah Allah ‘Azza wa Jalla dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah ‘Azza wa Jalla, dalam hal ini anggota yang dimaksud adalah anak.¹¹⁶

Secara khusus al-Qur an sangat memerhatikan pemeliharaan anak-anak yang belum *mumayyiz*, hal ini sesuai dengan firman Allah Subh^{anahu} wa Ta’ala> dalam al-Quran:

¹¹⁵ Departemen agama RI, *Op. Cit*, h. 560.

¹¹⁶ Sohari dan Tihami Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 216-217.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya. “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS. *al-Baqarah* [2]: ayat 233)¹¹⁷

Berdasarkan ayat di atas, Allah ‘Azza wa Jalla memrintahkan kepada kedua orang tua agar memelihara anak-anak mereka yang belum *mumayyiz*. Memerintahkan ibu agar menyusui anaknya sebelum dua tahun penuh. Sedangkan ayah berkewajiban menanggung nafkah bagi keduanya dengan cara yang baik. Dan membolehkan mengambil wanita lain untuk menyusukan anak-anak mereka, dengan catatan memberikan pembayaran kepadanya dengan cara yang patut. Lebih lanjut, dalam ayat tersebut Allah ‘Azza wa

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jalla mengisyaratkan, agar ibu dan ayah tidak menderita karena anaknya. Hal ini dimaksudkan agar orang tuanya berhalangan, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarga yang mampu.¹¹⁸

Jadi tanggung jawab nafkah istri dan anak menjadi beban suami sekaligus sebagai ayah. Menurut Muhammad Syaltut berdasarkan yang dikutip di atas, al-Quran menjelaskannya secara eksplisit (sarih) tentang tanggung jawab ayah.¹¹⁹ Dalam riwayat al-Baihaqī dari Abi Rafi', Rasul Sallallahu 'Alaihi wa Sallam, mengatakan:

حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يَعْلَمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَّاحَةَ وَالرَّمَايَةَ وَأَنْ لَا يَرْزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا
(رواه البيهقي)¹²⁰

“Hak seorang anak atas orang tuanya adalah hendaknya orang tuanya mengajarnya menulis, renang, memanah, dan tidak memberinya rezeki kecuali rezeki yang baik”. (H.R. Baihaqī)

Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai adanya globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Ini dimaksudkan, agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kebutuhan materil si anak, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang, turut menjadi faktor penentu pembentukan kepribadian anak. Kualitas komunitas antara anak dan orang tuanya mutlak perlu mendapat perhatian.

¹¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, Citra Niaga Perguruan Tinggi, 1983), h. 236.

¹¹⁹ Lihat. Muhammad Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syariah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 165.

¹²⁰ Jalan al-Din, al-Suyuti, *al-Jami' al-Sagīr*, juz 2, (Bandung: al-Ma'arif, t.t.), h. 149.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila hal ini tidak terpenuhi, pada akhirnya si anak akan mencari kompensasi di luar, yang besar kemungkinan akan lebih besar mendapat pengaruh negatif dari pergaulan.¹²¹

Dasar hukum mengenai kewajiban memelihara anak selain terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, juga terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Mengenai kewajiban terhadap anak terdapat dalam 45 yaitu:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal (1) berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.¹²²:

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya”.

Para ulama sepakat bahwasanya hukum *hadanah*, mendidik dan merawat anak adalah wajib. Tetapi para Ulama berbeda pendapat dalam hal, apakah *hadanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafiyah dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *hadanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *hadanah* itu menjadi hak bersama antara orang

¹²¹ *Ibid*, h. 240.

¹²² Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2001), cet. Ke-3, h. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaili, hak *ḥadānah* adalah hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak dan kepentingan anak.¹²³

Sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili hak *ḥadānah* merupakan hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak yang diasuh. Dalam pengertian diserahkan kepada anak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya.¹²⁴

C. Pihak-pihak yang berhak atas *ḥadānah*

Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang berhak mengurus *ḥadānah* anak berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum wanita untuk mengurus *ḥadānah* anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Kemudian dari mereka di pilih salah satu dari mereka yang dekat dengan anak yang akan dipelihara. Setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki.

Dalam hal ini, para ulama terkadang berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai kemaslahatan yang di butuhkan. Orang-orang yang berhak mengurus *ḥadānah* itu terkadang hanya kaum perempuan saja, terkadang juga hanya untuk kaum laki-laki saja, dan kadang juga untuk kedua-duanya bergantung sesuai usai anak yang akan dipelihara.

¹²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopeledia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), h. 415.

¹²⁴ Andi Syamsu l Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan pada usia tertentu kaum lelaki lebih mampu dalam memelihara anak daripada kaum wanita.

1) Urutan orang-orang yang berhak atas pengasuhan

1. Dari kaum perempuan

a) Ibu ke atas

Pertama, ibu si anak merupakan orang yang berhak atas hak asuh, baik ia masih terikat perkawinan dengan bapak si anak ataupun telah di ceraikan. Sebab, yang merupakan orang yang paling sayang dan paling lembut terhadap si anak daripada yang lain. Hal ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah ﷺ *‘Alaihi wa Sallam*. Kemudian berkata, “wahai Rasulullah, sesungguhnya anak laki-lakiku ini, baginya perutku itu wadah, kamarku itu hawa, dan puting susu itu minuman. (namun), bapaknya menceraikanku dan ingin merebutnya dariku.” Rasulullah ﷺ *‘Alaihi wa Sallam* bersabda, “kamu lebih berhak atasnya, sepanjang kamu tidak kawin (lagi).”

Kedua, ibu dari ibu ke atas atau nenek si anak yang di asuh dari pihak ibu.¹²⁵

Ketiga, ibu dari bapak ke atas atau nenek anak yang di asuh dari pihak bapak.

¹²⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Op. Cit*, h. 585-586.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyebab nenek dari ibu lebih dikedepankan daripada nenek pihak bapak, bahwa meskipun keduanya sama dalam kedekatan, tetapi karena yang pertama (nenek dari ibu) berasal dari pihak ibu, sedangkan hak asuh itu sendiri diambil dari pihak ibu maka kekerabatan yang berasal dari pihak ibu lebih dikedepankan daripada kekerabatan daripada pihak yang berasal dari pihak bapak.

- a) Saudara perempuan
 1. Saudara perempuan sekandung
 2. Saudara perempuan se ibu
 3. Saudara perempuan se bapak
- b) Anak perempuan dari saudara perempuan. Urutannya sebagai berikut
 1. Anak perempuan dari saudara perempuan yang sekandung
 2. Anak perempuan dari saudara perempuan se ibu

Sedang posisi anak perempuan dari saudara perempuan seapak berada di akhir setelah para bibi dari pihak ibu.¹²⁶

- c) Bibi dari pihak ibu

¹²⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bibi dari ibu yang sekandung
2. Bibi dari ibu yang se ibu
3. Bibi dari ibu yang seapak

Setelah para bibi dari pihak ibu barulah anak perempuan dari saudara perempuan yang seapak. Sedang penyebab di akhirkannya anak perempuan dari saudara perempuan seapak adalah karena hak asuh diambil dari bibi dari pihak ibu. Status kekerabatan bibi dari pihak ibu itu diambil dari ibu. Sedang anak perempuan dari saudara perempuan seapak itu derajatnya lebih jauh dari bibi dari pihak ibu dan kekerabatannya pun bukan dari pihak ibu.

- d) Anak perempuan dari saudara laki-laki
 1. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
 2. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
 3. Anak perempuan dari saudara laki-laki seapak.¹²⁷

Perlu diperhatikan, bahwa anak perempuan dari saudara laki-laki itu tidak sama dengan anak perempuan dari saudara perempuan. Sebab, kekerabatan anak perempuan dari anak saudara perempuan kepada anak yang diasuh melalui jalur saudara perempuan dan saudara perempuan itu sendiri atas hak asuh. Sedang kekerabatan anak

¹²⁷ *Ibid*, h. 587.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan dari saudara laki-laki dari jalur saudara laki-laki. Sementara, saudara laki-laki tidak mempunyai hak asuh bila ada perempuan oleh karena itu, orang yang mempunyai hak asuh dari pada yang tidak.

e) Bibi dari bapak

1. Bibi dari bapak yang sekandung
2. Bibi dari bapak yang seibu
3. Bibi dari bapak yang seabapak

Perlu diwaspadai, bahwa anak perempuan dari bibi dari pihak ibu, atau anak perempuan dari bibi dari pihak bapak itu tidak berhak atas hak asuh pasalnya, mereka bukanlah muhrim yang diharamkan bagi anak yang di asuh. Sementara, syarat perempuan untuk mendapatkan hak asuh anak, bahwa hendaknya mereka itu muhrim dengan si anak.

f) Bibi ibu, baik dari pihak nenek (*khalah al-'um*) ataupun dari pihak kakek (*'amah al-'um*)

1. Bibi ibu dari pihak nenek yang sekandung
2. Bibi ibu dari pihak nenek yang seibu
3. Bibi ibu dari pihak nenek yang seabapak
4. Bibi ibu dari pihak kakek yang sekandung
5. Bibi ibu dari pihak kakek yang seibu
6. Bibi ibu dari pihak kakek yang seabapak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Bibi bapak, baik dari pihak nenek (*khalah al-'ab*) ataupun dari pihak kakek (*'amah al'ab*). Urutannya sama dengan urutan diatas.¹²⁸

D. Syarat-syarat *ḥadānah*

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh disebut *ḥādīn* dan anak yang di asuh disebut *maḥḥūn*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu.¹²⁹

Pengasuhan adalah hak pengasuh perempuan dan hak anak yang di asuh. Namun demikian, hak anak yang di asuh itu lebih besar daripada hak pengasuh perempuan. Oleh karena itu, dalam menetapkan hak asuh kepada pengasuh, baik pengasuh perempuan maupun laki-laki, harus benar-benar diperhatikan kemaslahatan si anak.¹³⁰

Sebagian dari syarat-syarat itu bersifat umum dan harus dipenuhi oleh setiap orang. Sedang sebagian lagi lainnya bersifat khusus bagi perempuan dan sebagian lagi bersifat khusus untuk laki-laki.

¹²⁸ *Ibid*, h. 588.

¹²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. Ke-3, h. 328.

¹³⁰ Abdul Majiid Mahmud Mathlub, *Al Wajiz Fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah*, alih bahasa oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Solo: Era Intrmedia. 2005), h. 589.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Syarat Umum Untuk Mendapatkan Hak Asuh Anak

Disyaratkan hal berikut bagi perempuan dan laki-laki yang ingin mendapatkan hak asuh anak.

1) Baligh

Hak Asuh tidak dapat ditetapkan bagi anak kecil, meskipun ia telah pintar. Pasalnya, anak kecil tidak dapat mandiri dengan persoalannya dan selalu membutuhkan orang lain.

2) Berakal

Hak asuh tidak dapat diberikan kepada orang gila, baik laki-laki maupun perempuan. Hak asuh pun tidak dapat diberikan kepada orang *ma'tub* (idiot), baik laki-laki maupun perempuan.

3) Mampu mendidik si kecil dan mengurusnya

Berdasarkan hal ini, hak asuh tidak dapat diberikan kepada orang yang tidak dapat melaksanakan pengasuhan. Mengenai ketidak mampuan ini, tidak ada penyebab tertentu. Pasalnya ketidak mampuan itu kadang disebabkan oleh usia yang sudah tua atau kesehatan yang lemah. Namun, kadang pula ketidak mampuan itu disebabkan oleh penyakit ganas yang membuat seorang tidak berdaya, sehingga ia tidak dapat mengurus dirinya ataupun orang lain. Kadang pula, ketidak mampuan itu disebabkan oleh kesibukan kerja.¹³¹

¹³¹ *Ibid*, h. 590-591.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Amanah

Orang yang mengasuh anak dapat menjaganya dari segala sesuatu yang dapat merusak kesehatan, perilaku, mental, atau agamanya sehingga orang yang tidak dipercaya tidak berhak mengasuh anak kecil.

Dengan demikian, apabila seorang fasik (laki-laki atau perempuan) yang kefasikannya menghalanginya untuk mengasuh anak kecil maka ia berhak mengasuhnya.¹³²

Akan tetapi Ibnu Abidin menjelaskan kefasikan yang menghalangi hak untuk mengurus anak adalah kefasikan seorang ibu sehingga menyia-nyiakan anak. Ia tetap berhak mengurus *haddan* anak meskipun sudah terkenal fasik, dengan syarat selama si anak belum mencapai usia mampu memikirkan kefasikan ibunya. Namun jika sudah mampu maka anak tersebut harus di jauhkan dari ibunya untuk menyelamatkan masa depan akhlak si anak.¹³³

5) Orang yang mengurus *haddan* anak disyariatkan harus beragama Islam.

Menurut Syāfi'iyah dan Hanabilah orang kafir tidak berhak mengurus *haddan* anak orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang orang Islam. Selain itu, juga ditakutkan terjadi pengafiran terhadap anak tersebut. akan tetapi, ulama Hanāfiyyah dan Mālikiyyah tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus agama Islam.

¹³² *Ibid.*

¹³³ Wahbah Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Depok: Gema Insani, 2007), h. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mereka, non muslim kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi *hādīnah* atau pemeliharaan, baik ibu sendiri maupun orang lain.¹³⁴

Wahbah Zuhailly dalam Bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ia menyebutkan pengasuh anak yaitu.¹³⁵

- a. Syarat-syarat khusus untuk *hādīnah*

Selain syarat-syarat diatas, untuk perempuan masih ada syarat khusus sebagai berikut:

- 1) perempuan yang sudah cerai, namun yang masih punya anak kecil boleh memelihara anaknya dengan syarat ia belum menikah lagi dengan lelaki lain, atau lelaki yang terhitung kerabat, namun bukan mahram.

Pendapat ini telah disepakati para ulama karena ada hadits yang berbunyi, “Engkau lebih berhak atas *hādīnah* anak itu selama engkau belum menikah lagi.” Syarat ini ditetapkan karena terkadang seorang ayah memperlakukan anak tirinya dengan kasar, sedangkan ibu kandung anak tersebut sibuk dengan tugasnya sebagai berikut.

- 2) Perempuan yang jadi *hādīnah* itu syaratnya harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya, seperti ibu si anak, saudara perempuan si anak, dan nenek si anak.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid*, h. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak *ḥadīnah* tidak diberikan kepada anak perempuannya paman dari jalur ibu, atau anak perempuannya bibi dari jalur ibu. Alasannya karena tidak ada hubungan mahram kepada si anak, namun mereka menurut Hanafiyah tetap berhak mengurus *ḥadīnah* anak perempuan.¹³⁶

- 3) Perempuan yang jadi *ḥadīnah* tidak berhenti meskipun tidak diberi upah *ḥadīnah* karena memang ekonomi ayah si anak sedang kesulitan sehingga tidak mampu membayar upah *ḥadīnah*.

Jika ekonomi ayah si anak sedang sulit sehingga tidak mampu membayar upah *ḥadīnah* itu berhenti dari tugasnya dan digantikan kerabat dekat lainnya maka haknya sebagai *ḥadīnah* gugur: syarat ini ditetapkan oleh ulama hanāfiyah.¹³⁷

- 4) *Hadhinah* tidak tinggal bersama orang yang dibenci oleh anak asuhnya, meskipun orang itu kerabat dekat si anak sendiri karena hal ini akan menimbulkan dampak negatif pada diri anak jika sudah menikah.

Jadi, seorang nenek tidak berhak mengurus *ḥadīnah* anak kecuali jika sudah pisah rumah. Syarat ini ditetapkan oleh ulama Malikiyyah. Sedangkan ulama Syāfi'īyah dan Hanabilah mengisyaratkan,

¹³⁶ *Ibid*, h. 65.

¹³⁷ *Ibid*, h. 69.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika anak yang dipelihara itu sedang dalam menyusui maka hadhinah harus menyusunya, dan jika ASI-nya tidak keluar, atau ia menolak untuk menyusui maka haknya mengasuh gugur.¹³⁸

Syarat-syarat khusus untuk *ḥāḍin*

Begitu juga dengan *ḥāḍin* laki-laki harus memenuhi juga syarat-syarat khusus.

- 1) Seorang *ḥāḍin* harus termasuk mahramnya anak yang diasuh jika anak tersebut cantik, dan usianya tujuh tahun menurut Hanabilah dan Hanāfiyah. Tujuan syarat ini tidak lain agar tidak terjadi khalwat antar keduanya. Jika si anak belum mencapai usia yang menimbulkan syahwat maka diperbolehkan karena tidak menimbulkan fitnah.
- 2) Di rumah seorang *ḥāḍin*, baik ayah maupun yang lainnya harus ada seorang perempuan yang mampu mengurus *ḥāḍin* anak seperti istri, ibu, bibi, dan tante. Alasannya, karena seorang lelaki tidak mampu atau tidak punya kesabaran untuk mengurus anak, berbeda dengan kaum perempuan. Jika di rumah *ḥāḍin* tidak ada perempuan yang biasa mengurus anak maka haknya untuk mengurus anak gugur. Syarat ini ditetapkan oleh ulama Malikiyyah.¹³⁹

Mengenai syarat-syarat bagi si pengasuh baik orang tua (ayah dan ibu), terdapat beberapa pendapat para fuqaha' yaitu:

¹³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Op. Cit, h. 68-69.

¹³⁹ *Ibid*, h. 69-70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Aziz Dahlan dalam bukunya Esiklopedia Islam

- 1) Syarat-syarat khusus bagi wanita adalah:
 - a) Wanita itu belum kawin setelah dicerai oleh suaminya
 - b) Wanita itu harus mahram atau muhrim dari anak tersebut
 - c) Pengasuh itu tidak mengasuh anak tersebut dengan marah dan kebencian
 - d) Apabila usia anak itu masih menyusui pada pengasuhnya, tapi air susunya tidak ada atau enggan menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh anak itu
- 2) Syarat-syarat khusus bagi laki-laki adalah:
 - a) Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak itu seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut
 - b) Apabila anak itu wanita disyaratkan berusia 7 tahun sehingga tidak menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang di asuh.¹⁴⁰

Sayyid Sabiq dalam buku fiqih sunnahnya menyebutkan syarat-syarat pengasuhan anak itu ada 5, yaitu:¹⁴¹

- a) Berakal sehat, jadi orang yang kurang akal atau gila keduanya tidak boleh mengenai hadanah, karena mereka tidak bisa

¹⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Heove, 1999), h. 418.

¹⁴¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurusi dirinya sendirian, maka tiak boleh pula diserahkan untuk mengurusi orang lain.

- b) Dewasa atau baligh, sebab anak kecil sekalipun ia telah *mumayyiz*, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya. Karena ia tidak boleh menangani urusan orang lain
- c) Memiliki kemampuan untuk mendidik anak, pengasuh anak tidak boleh diserahkan kepada orang buta, rabun, sakit menular, atau penyakit yang melemaskan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil yang diurusnya.

Bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menukar atau orang yang suka marah kepada anak-anak sekalipun ia keluarga anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya ia tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik. Hal seperti ini besar kemungkinan sang anak tidak mendapat pendidikan yang memenuhi

- d) Amanah dan berbudi pekerti yang baik, perempuan yang tidak memegang amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil.¹⁴²

¹⁴² Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Beragama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh di asuh oleh orang yang non muslim, karena pengasuhan anak merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin diasuh oleh kafir. Sebagaimana firman Allah ‘Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 141 yang berbunyi: “ Dan Allah ‘Azza wa Jalla tidak memberikan jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman” . (Q.S an-Nisa’: 141)

وَلَنَجْجَعَلَنَّ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

- f) Ibunya belum menikah lagi, jika si ibu telah menikah dengan laki-laki lain maka hak *hadhanah*nya hilang atau gugur
- g) Merdeka, sebab seorang budak tentulah sibuk dengan urusan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil tersebut.¹⁴³

Dari pendapat para ahli tersebut dapat difahami bahwa syarat yang dikemukakan itu mempunyai maksud dan tujuan yang sama, walaupun ada perbedaan tapi itu sangat dibutuhkan sekali dalam pelaksanaan *hadhanah*, sehingga dengan perbedaan tersebut bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Semakin banyak persyaratan *hadhanah*nya itu dapat dipenuhi akan lebih menjamin untuk terciptanya generasi yang sehat, berakal dan berbudi pekerti yang mulia serta mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi.

¹⁴³ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulannya yaitu orang yang berhak melakukan *hadhanah* adalah orang tua (ayah dan ibu), bila keduanya sama-sama memenuhi persyaratan untuk menjadi *hadhin* ia berhak atas anaknya, bila anaknya masih *mumayyiz* maka ibulah yang lebih berhak, karena ibu dianggap lebih dekat, lebih berpengalaman, dan lebih sabar dalam hal tersebut.

E. Upah *hadhanah*

Apabila seseorang melakukan pekerjaan orang lain maka ia berhak mendapatkan imbalan atas pekerjaan tersebut, kecuali ia melakukannya dengan suka rela. Pengasuhan adalah pekerjaan yang berhak mendapatkan imbalan bagi siapa saja yang melakukannya, kecuali jika ia berhak mendapatkan nafkah dari orang yang memberi nafkah si anak.¹⁴⁴

Mengenai apakah harus mengeluarkan upah untuk *hadhanah*, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah, seorang *hadhin* tidak berhak upah *hadhanah*, baik statusnya sebagai ibu maupun selainnya karena seorang ibu berhak mendapatkan nafkah jika statusnya seorang istri. Adapun jika statusnya selain ibu dari si anak maka nafkahnya di tanggung bapak.

Ulama Hanafiyah berkata, seorang *hadhinah* tidak berhak mendapatkan upah *hadhanah* jika statusnya sebagai istri atau dalam masa iddah cerai, baik cerai ba'in maun *raj'i*, seperti halnya tidak mendapatkan upah *radh'* karena wajibnya dua hal tersebut seperti hutang.

¹⁴⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Op. Cit*, h. 605.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping ia juga berhak mendapatkan nafkah sebagai istri maupun dalam iddah, dan nafkah itu cukup untuk keperluan *ḥaḍanah*.

Adapun setelah selesainya *iddah* maka *ḥaḍinah* berhak meminta upah *ḥaḍanah*, karean terhitung upah pekerjaan. Seorang *hadhinah* statusnya bukan istri juga berhak mendapatkan upah *ḥaḍanah* itu, namun upah itu belum termasuk upah menyusui dan nafkah untuk anak. Jadi semuanya ada tiga kewajiban, yaitu upah *ḥaḍinah*, upah menyusui, dan nafkah si anak.¹⁴⁵

F. Masa *ḥaḍanah*

Mengenai masa *ḥaḍanah* tidak ada nash dalam Al- qur an maupun Sunnah yang menjelaskan secara tegas tentang masa *ḥaḍanah* ini, maka dari itu para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan masa *ḥaḍanah* tersebut. Sebagian para fuqaha berpendapat, bahwa akhir asuhan seorang anak laki-laki, yaitu ketika mencapai umur tujuh tahun, sedangkan sembilan tahun untuk anak perempuan. Ini adalah fatwa imam Mazhab Hanafi. Diriwayatkan dari Mazhab Syafi'i bahwa sang ibu berhak mengasuh anaknya, laki-laki atau perempuan hingga berumur tujuh tahun (atau pada riwayat lain berumur delapan tahun) dan ia telah berakal maka ia diperintahkan untuk memilih bersama ibu atau bapaknya.

Mazhab Hanbali berpendapat, bahwa tempo asuhan untuk anak laki-laki atau perempuan adalah tujuh tahun. Apabila ia mencapai umur tujuh tahun, ia diperintahkan untuk memilih di antara kedua orang tuanya.

¹⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit*, h. 72-73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Mālik, bahwa asuhan anak laki-laki hingga ia balig, sedang bagi perempuan hingga ia dicampuri oleh suaminya, kecuali jika ada yang ditakutkan setelah balig. Ibu Hazm berkata, bahwa ibu lebih berhak mengasuh anaknya yang laki-laki atau perempuan hingga haid atau bermimpi, disertai dengan *mumayyiz* dan kesehatan badan.¹⁴⁶

Sedangkan Tihami dan Sohri dalam buku *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, *ḥadan* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa *ḥadan* masa wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau setelah datang masa haid pertamanya.¹⁴⁷

II. MAQASID SYARI'AH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Maqasid Syari'ah.

Secara bahasa, maqasid syariah (مقصد شريعة) terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syari'ah. Kata maqasid merupakan jama' dari kata maqsud yang berarti maksud dan tujuan.¹⁴⁸ Sedangkan syariah masdar dari syara'a yang berarti yang berarti peraturan atau Undang-undang.¹⁴⁹

¹⁴⁶ Abdul Majiid Mahmud Mathlub, *Op. Cit*, h. 596, Lihat juga Yusuf Qasim, *Huquq Al-Usrah*, h. 398.

¹⁴⁷ Tihami dan Sohri, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Wanita Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet, Ke-4, h. 224.

¹⁴⁸ Al Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prgresif, 1997), Cet. Ke-14, h. 1124.

¹⁴⁹ *Ibid*, h. 711, lihat juga Aḥmad Najeh, *Kamus Arab Indonesia*, (Surakarta: Insan Kamil, 2010), h. 242.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gofur Sidik mengartikan syariah yaitu hukum-hukum Allah ‘Azza wa Jalla yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁵⁰

Sedangkan syariah secara bahasa dalam kamus Ilmu Ushul Fiqih adalah jalan menuju sumber air. ()¹⁵¹. Yang berarti Jalan menuju air dapat di artikan jalan menuju kehidupan.¹⁵² Disebutkan dalam al-Qur an, Allah Subhānu wa Ta‘āla>menyatakan beberapa kata syariah diantaranya:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian kami menjadikan engkau (Muhammad) mengikuti Syari’at (Peraturan) dari agama itu. Maka ikutilah (Syariat itu) dan janganlah engkau ikut keinginan orang-orang yang tidak mengetahui” (QS. al-Jasyah [45]: ayat 18)¹⁵³

Selain pengertian di atas juga muncul defenisi syariah yang lain. syariah menurut Muhammad Said Asmawi berarti “jalan menuju Allah ‘Azza wa Jalla”. Menurutnya pengertian ini mencakup aturan-aturan hukum yang diwahyukan dalam al-Qur an dan aturan-aturan yang termuat dalam hadits,

¹⁵⁰ Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid syariah Al-Syariag dalam Hukum Islam*(tt. th, h. 119.

¹⁵¹ Lihat Ibnu Mansur al-Afriqi, *lisan a-‘Arab*, (Beirut: Dar al-Sadrm t.th), h. 175.

¹⁵² Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Banung: Pustaka, 1948), h. 140.

¹⁵³ Kementerian Agama, *Op. Cit*, h. 500.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan selanjutnya tafsir, pendapat, ijtihad, fatwa serta keputusan hakim.¹⁵⁴

Sedangkan menurut Muhammad Syaltut sebagaimana yang dikutip oleh Aibak, syariah adalah aturan-aturan yang diciptakan pedoman bagi manusia dalam mengatur hubungan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim maupun non muslim, alam dan seluruh kehidupan.¹⁵⁵

Dari makna *maqasid* dan syariah secara bahasa tersebut, kita dapat mengambil pengertian bahwa *maqasid* syariah adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah 'Azza wa Jalla dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat hukum.

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *maqasid as-syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh syari' dalam setiap keutamaan hukum.¹⁵⁶

Maqasid syariah menurut Syatibi, hukum Islam di syariatkan untuk mewujudkan dan memelihara *maslahat* umat manusia di dunia maupun di akhirat. Pada setiap hukum terkandung kemaslahatan bagi umat manusia baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi.¹⁵⁷

¹⁵⁴ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 85-86.

¹⁵⁵ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, (tt. th), h. 52.

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ Syatibi, *Muwafaqat*, jilid 2, (Saudi Arabian: Dar Ibn Affan, 1997), h. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, *maqasid al-Syariah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah untuk individu, keluarga, jamaah, dan ummat.¹⁵⁸

Adapun inti dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau disebut juga menarik manfaat menolak mudarat. *Maqasid syariah* dapat diistilahkan juga dengan kata *maslahat*, karena penetapan hukum Islam akhirnya harus bermuara kepada *maslahat*.

Di dalam kitab *al-Muwāfaqat* Imam Syatibi menjelaskan bahwa seluruh hukum syara' secara bersamaan ditujukan untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun akhirat. Banyak nash yang menjelaskan sebuah perintah atau larangan disertai dengan *illat* (alasan), sebab atau tujuan baik secara tersurat pada ayat-ayat Al qur an dan hadits (*dalil naqli*) atau tersirat. Di antara landasan *maqasid syariah* seperti dikutip oleh Syatibi,¹⁵⁹ adalah firman Allah sebagai berikut:

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ

اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

“(mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia

¹⁵⁸ Yusuf Qarawi, *fiqh maqasid syariah*, alih bahasa oleh Arif Munandar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 17.

¹⁵⁹ Syatibi, *Op. Cit*, h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. *an-Nisa* [4]: ayat 165).¹⁶⁰

Ibnu kasir ketika menafsirkan ayat ini, mengemukakan bahwa Allah

'Azza wa Jalla mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan mengikuti hal-hal yang diridoi-Nya.

Allah *'Azza wa Jalla* menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus rasul-rasul-Nya agar tidak ada lagi alasan bagi orang-orang yang ingkar setelah diutusnya para rasul.¹⁶¹

Ayat ini menjelaskan tentang tujuan Allah *'Azza wa Jalla* (maksud *al-Syari'*) menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus rasul-rasulnya, yaitu agar tidak ada lagi alasan bagi orang kafir, munafiq, musyrik dan pendosa di hadapan Allah *'Azza wa Jalla* tentang kejahatan yang mereka lakukan. Berkali-kali para rasul mengingatkan mereka untuk tidak mengingkari Allah *'Azza wa Jalla* dan jangan melakukan kemaksiatan, sebab hal itu mendatangkan murka dan Azab Allah *'Azza wa Jalla*.

Imam Syatibi memberikan beberapa contoh yang menunjukkan di dalam ayat terkandung syariat (maksud) Misalnya, mengenai shalat, Allah Subhānu wa Ta'āla berfirman:

¹⁶⁰ Kementerian Agama, *Op. Cit*, h. 104.

¹⁶¹ Abu al Fida' Ismail ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, Juz 2, (Kairo: Muassasah Quthubah wa MAktabah Aulad al-Syaikh li al-Turats, 2000), h. 375.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al- Ankabut[29]: ayat 45)¹⁶²

Ibnu kaşir dalam menafsirkan ayat ini bahwa shalat mengandung dua hal, didalam shalat mesti terkandung atau membuat pelaku untuk meninggalkan perbuatan keji dan munkar serta dapat mengingat Allah ‘Azza wa Jalla.¹⁶³

Sedangkan Abu ‘Aliyah mengatakan di dalam sholat mesti terkandung tiga hal, yaitu; ikhlas, takut kepada Allah dan mengingat Allah ‘Azza wa Jalla, Ikhlas akan pelakunya berbuat baik, takut mengerjakan kemungkaran serta mengingat Allah ‘Azza wa Jalla.¹⁶⁴

Berdasarkan ayat ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Allah memerintahkan shalat agar seseorang tercegah dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Sedangkan diayat lain Allah ‘Azza wa Jallah menjelaskan shalat akan membuat seseorang menjadi tenang. Inilah dia antara maqasid al-Syariah dari perintah shalat.

¹⁶² Kementerian Agama, *Op. Cit*, h. 401.

¹⁶³ *Ibid*, h. 270.

¹⁶⁴ *Ibid*, h. 282.



B. Sejarah Maqasid Syari'ah

pada awalnya, kajian maqasid *al-syariah* menjadi kajian dalam penerapan *qiyas*, *istislah* atau *al-maslahah al-Mursalah* terutama ketika membahas *munaṣibillah* atau *masālaik al-illah*. Ini dapat dilihat dari kitab *al-Burham fi Uṣul al-Fiqh* karya Imam al-Juwaini¹⁶⁵.

Kata *al-Maqasid* sendiri menurut Ahmad Raisuni, pertama kali digunakan oleh Turmudzi al-Hakim, ulama yang hidup pada abad ke-3. Dialah, menurut Raisuni, yang pertama kali menyuarakan maqasid syariah melalui buku-bukunya, *al-Salah wa Maqasiduhu*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-illah*, *illal al-Syariah*, *illal al-Ubudiyah* dan juga bukunya *al-Faruq* yang kemudian diadopsi oleh Imam al-Qarafi menjadi judul buku karangannya.

al-Ayyubib mencoba menyusun peta pemikiran para tokoh tentang maqasid syariah dengan pendekatan kronologis sejarah. Ia membagi dua babak atau periode maqasid yaitu era syatibi dan sebelumnya (era klasik) dan periodisasi agaknya dapat diterima, disebabkan antara lain; pertama, Syatibi dianggap sebagai Bapak maqasid Syari'ah. Kedua, terdapat perbedaan yang mencolok antara kedua periode. Periode pertama dapat dianggap sebagai penyempurnaan dari teori mashlahah ulama-ulama klasik seperti Juwainy,

¹⁶⁵ Mohammad Abdi Al-Maktsur, *Maqasid Syariah teori dan kaedah-kaedah Terapannya dalam Ijtihad*, (Riau: Suska Riau Press, 2015), h. 26, lihat juga Imam al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, juz 2, (Kairo: Dar al-Anshor, t.th), h. 905-930.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Ghazali, al-Amidi, al-Razy dan sebagainya. Dalam hal ini dikecualikan Ibnu Taymiyah yang memiliki teori tersendiri tentang maqasid.¹⁶⁶

Sedangkan periode kedua tidak lagi terpaku kepada klasifikasi maqasid ulama klasik. Mereka menawarkan banyak konsep maqasid. Era ini secara substantif, dimulai dari pemikiran Ibnu Taimiyah, dan mengalami kemajuan di era Ibnu 'Asyur, Ahmad Raisuni Yusuf Qardawi dan sebagainya. Walaupun beberapa ahli Ushul lainnya masih sangat banyak yang berpegang kepada pendapat ulama klasik dan nyata-nyata mendukung Syatibi.¹⁶⁷

Menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi sebagaimana dikutip oleh Agustianto Mingka,¹⁶⁸ sejarah maqasid al-Syariah dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Ibnu Taimiyah dan fase setelah Ibnu Taimiyah. Padahal yang lebih tepat sesungguhnya adalah membagi fase maqasid al-Syariah kepada sebelum al-Syatibi, karena sekian banyak ulama yang membahas maqasid, ternyata Imam Syatibi-lah pembahasannya yang paling sistematis dan komprehensif dengan metodologi *sophisticate* yang belum ada sebelumnya.

Kemunculan al-Syatibi dengan kitabnya *al-Muwafaqat* membuka lembaran baru bagi evolusi teori maqasid. Sejak itu, maqasid dibahas secara terpisah dari dalil-dalil dalam metode penemuan hukum,

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ Agustino Mingka, *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, (Ciputat: Iqtishad Publising, 2013), h. 5.



meskipun menjadi disiplin ilmu secara independen. Usaha *al-Syatibi* terus dielaboras oleh Muhammad Thahir Ibn Asyur dengan kitabnya *maqasid al-Syariah al-Islamiyah*. Dalam konteks ini, ilmu *maqasid* telah mendapat suntikan baru dan menjadi disiplin ilmu yang independen sebelumnya menjadi bagian dari kajian ushul fiqih.¹⁶⁹

C. Tujuan dan Klasifikasi Maqasid Syari'ah

Maqasid *syari'ah* ialah tujuan al-Syari' (Allah 'Azza wa Jalla dan Rasulullah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam). Dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari Nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan.¹⁷⁰

Menurut As-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Mardani dalam bukunya, tujuan pokok Syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan *al-Kulliyah al-Khamsah* atau *al-qowaid al-kulliyat*. untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan,¹⁷¹ yaitu:

¹⁶⁹ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2019), h. 108.

¹⁷⁰ Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 333.

¹⁷¹ *Ibid*, h. 337.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kebutuhan Dāruriyat

Imam Syatibi menjelaskan dāruriyat adalah hal-hal yang mesti ada untuk menjaga kemaslahatan agama dan kehidupan dunia. Bila ia hilang, kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan kehidupan akan rusak, serta di akhirat akan kehilangan kemenangan dan nikmat, dan kembali dengan kerugian yang nyata.¹⁷²

Kebutuhan dāruriyat ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak ada terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Pengertian yang sama dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, dāruriyat adalah hal-hal yang menyanggah kehidupan manusia, ia mesti ada demi menjaga kemaslahatan mereka. Bila ia hilang, hancurlah tatanan kehidupan mereka. Kemaslahatan tidak akan terjaga, menyebar kekacauan dan kerusakan. Sedangkan Amir Syarifuddin mengartikan dāruriyat dengan “sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhi kehidupan tersebut.”¹⁷³

Menurut Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.

¹⁷² Imam Syatibi, *Op. Cit*, h. 17.

¹⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid 2, (Jakarta: Kencana 2009), h. 222.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam di turunkan.¹⁷⁴ Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas. Misalnya, firman Allah Subhānu wa Ta'āla dalam mewajibkan jihad:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”(QS. *al-Baqarah* [2]: ayat 193).¹⁷⁵

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa tujuan di syariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah ‘Azza wa Jalla.¹⁷⁶

Cara menjaga lima kemaslahatan di atas, kata Imam Syatibi sebagaimana dikutip oleh Mohammad Abdi Almakşur dan Afrizal Ahmad, dapat ditempuh dengan dua cara. Yaitu:

- a. Dari segi adanya (*min nahyyati al-Wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Hal ini dapat juga disebut dengan *jalbu al-Masālih*.

¹⁷⁴ Imam Syatibi, *Op. Cit*, h. 20.

¹⁷⁵ Departemen Agama, *Op. Cit*, h. 30.

¹⁷⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet-2, h. 235.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dari segi tidak ada (*min naḥiyyati al-‘Adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Hal ini disebut juga dengan *dar’u al-Mafasid*.

Untuk lebih jelasnya, contoh masalah *ḍaruriyat* ditinjau dari segi *wujud* dan *‘adam* dapat dilihat di bawah ini:

- c. Menjaga agama dari segi *al-Wujud*. Misalnya, Allah ‘Azza wa Jalla memerintahkan kaumnya untuk mendirikan shalat dan membayar zakat.
- d. Menjaga agama dari segi *al-‘Adam*. Misalnya, Allah ‘Azza wa Jalla memerintahkan kaum beriman untuk ber jihad. Serta melarang murtad.
- e. Menjaga jiwa dari segi *al-Wujud*. Misalnya, Allah ‘Azza wa Jalla menyuruh manusia untuk makan dan minum.
- f. Menjaga jiwa dari segi *al-‘Adam*. Misalnya, Allah ‘Azza wa Jalla melarang untuk membunuh tanpa hak serta memerintahkan pelaksanaan hukuman *qisās* dan *diyat* bagi pembunuh.
- g. Menjaga *‘aql* dari segi *al-Wujud*. Misalnya, Islam menyuruh kaum muslimin untuk mencari ilmu.
- h. Menjaga *aql* dari segi *al-‘Adam*. Misalnya, Islam mensyariatkan keharaman minum *khamar* dan melaksanakan had bagi peminumnya.
- i. Menjaga keturunan (*al-nasal*) dari segi *al-Wujud*. Misalnya, Islam mensyariatkan pernikahan.
- j. Menjaga keturunan (*al-Nasal*) dari segi *al-‘Adam*. Misalnya, Islam mensyariatkan larangan *berzina* serta pelaksanaan had bagi pelakunya dan bagi penuduh *zina*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menjaga *al-Mal* dari segi *al-Wujud*. Misalnya, Islam mensyariatkan jual beli dan mencari rezki.
- Menjaga *al-Mal* dari segi *al-Adam*. Misalnya, Islam mengharamkan riba, dan mensyariatkan untuk memotong tangan pencuri.¹⁷⁷

2. Kebutuhan Hajiyat

Syatibi menyebutkan *hajiyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam menjalani hidup dengan mudah dan terhindar dari kesulitan. Bila sesuatu ini tidak ada, ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan *masyaqah* (kesulitan) dan *haraj* (kesempitan).¹⁷⁸

Kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *skunder*, dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan seperti dijelaskan Abdul Wahab Khalaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat mengganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang sakit.

¹⁷⁷ Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, *Maqasid Syari'ah Teori dan Kaidah-Kaidah Terapannya Dalam Ijtihad*, (Riau: Susuka Press, 2015), h. 41-42.

¹⁷⁸ Imam Syatibi, *Op. Cit*, h. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebolehan meninggalkan dan diganti pada hari yang lain adalah merupakan dalam rangka memenuhi kebutuhan *haji*iyat.

Di dalam bidang agama dalam rangka *jalbu manfaat* umpamanya mempelajari agama di sekolah untuk dapat mempelajari agama itu dengan baik. Tanpa bersekolahpun agama itu tidak hilang, namun mendapat kesulitan dalam menjalankannya. Contoh dalam *daf'u mudharat* umpamanya mengolok-olok agama. Tindakan seperti ini tidak akan menghilangkan agama, namun dalam jangka jauh kalau tidak diantisipasi juga dapat menghancurkan agama itu sendiri.¹⁷⁹

3. Kebutuhan Tahsiniiyat

Kebutuhan tahsiniiyat ini dapat diartikan, sebagaimana diartikan oleh Amir Syarifuddin, yaitu sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk *jalbu manfaat* dan sebaiknya ditinggalkan untuk *daf'u mudharat*. Artinya kalau ditinggalkan dalam bidang agama umpamanya, tidak akan menghancurkan agama dan tidak akan mengurangi keberagamaan itu. Namun lebih baik dilakukan. Umpamanya belajar agama diperguruan tinggi.¹⁸⁰

Tiga tingkat sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan urutan kepentigan, artinya apabila terjadi benturan antara tingakat *daruri* dengan tingkat *haji*, maka yang didahulukan adalah tingkat *daruri*..

¹⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet-7, h. 240.

¹⁸⁰ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya, seorang dokter melihat aurat pasiennya perempuan dalam melakukan operasi kelahiran. Melihat aurat adalah terlarang dalam tingkat *haji*, sedangkan melakukan operasi dalam menyelamatkan nyawa adalah suruhan dalam tingkat *daruri*.

Untuk lebih rincinya lagi masalah yang telah disebutkan di atas.¹⁸¹

Akan dijelaskan secara rinci berikut ini:

1. Memelihara Agama (Hifz ad-Din)

Agama dalam pandangan Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat dikatakan sebagai esensi dari keberadaan manusia. Manusia tanpa agama seperti orang berjalan pada malam hari tanpa belita. Seorang filosof pernah berkata, banyak komunitas bisa hidup tanpa ilmu, seni, dan filsafat, tetapi tidak pernah ditemukan sebuah kelompok manusia yang hidup tanpa agama. Kenyataan bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan tersebut, pertama kali ditegaskan dalam agama Islam, yaitu bahwa agama adalah kebutuhan fitrah manusia.¹⁸²

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap umat yang di atas permukaan bumi, yaitu sejak manusia itu hidup tak bisa terlepas dari aqidah dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhānu wa

Ta'ālā :

¹⁸¹ Al-Ushu al-Khamsah (Hifz din, Hifz al-Nafs, Hifz al-'Aqal, Hifz al-Nasl dan Hifz al-Mal)

¹⁸² Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 211, Lihat juga Yusuf Hamid Al-'alim, *al-Maqasid al-Ammah li Al-Syariah Al Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Hadits, t.t), h. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

”Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai telah ada padanya seorang pemberi peringatan (QS. *al-Fatir* [5]: ayat 24).¹⁸³

Para ulama mengemukakan contoh *hifz al-din* ini, antara lain; Allah *‘Azza wa Jalla* mensyariatkan ajaran-ajaran inti atau ibadah-ibadah pokok, seperti iman (rukun iman), mengucapkan syahadat, shalat, zakat, puasa, haji (rukun islam) dan sebagainya untuk memelihara agama dari sisi *wujud*. Abdul Wahab Khalaf menambahkan kewajiban berdakwah, membantu dan menyelamatkan misi dakwah.¹⁸⁴

Dalam pengertian yang lebih luas dapat dikatakan, bahwa menta’ati seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya merupakan perwujudan dari memelihara agama (*hifz al-din*) dari segi *wujud*. Sedangkan menjauhi semua larangan Allah dan menerapkan hudud bagi pelakunya adalah perwujudan dari pemeliharaan agama (*hifz al-din*) dari segi *‘adam*.¹⁸⁵

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan prioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

- a. Memelihara agama dalam prioritas *daruriyat* (pokok), yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama termasuk kedalam prioritas utama

¹⁸³ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 437.

¹⁸⁴ Mohammad Abdi Al-Maktsur dan Afrizal Ahmad, *Op. Cit*, h. 69.

¹⁸⁵ *Ibid*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau primer seperti melaksanakan shalat lima waktu. Apabila shalat diabaikan maka akan terancamlah kebutuhan agama.

- b. Memelihara agama dalam prioritas *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dalam rangka menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qhasar bagi orang yang bepergian. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama melainkan hanya akan mempersulit orang yang sedang bepergian tersebut.
- c. Memelihara agama dalam prioritas *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Allah. Contohnya adalah memakai pakaian yang baik dan bersih ketika pergi ke masjid. Hal ini erat kaitannya dengan etika dan akhlak terpuji. Apabila hal ini tidak dilakukan maka tidak akan mengganggu eksistensi agama dan tidak akan mempersulit orang yang melakukannya. Artinya, tidak ada pakaian yang baik maka dia meninggalkan shalat di masjid jangan sampai karena tidak ada pakaian yang baik maka dia meninggalkan shalat yang termasuk dalam kategori *dharuriyat*.¹⁸⁶

Berkenaan dengan cara (*wasilah/masalik*) memelihara Agama, Abd al-Majid al-Najjar memberikan penjelasan, sebagaimana di kutip oleh Mohammad Abdi Al-Maktsur dan Afrizal Ahmad. Menurutnya, ada beberapa cara (*masalik*) dalam memelihara agama, antara lain.¹⁸⁷

¹⁸⁶ Amrullah Hayatudin, *Op. Cit*, h. 212.

¹⁸⁷ Lihat, Nasr Farid Muhammd Washil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memelihara agama dengan memenuhi sebab-sebabnya, Artinya, menjaga menjaga keberlangsungan eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama dengan memberikan kemudahan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama.
- 3) Memelihara agama dengan melakukan ijtihad, sebab hukum asal agama tidak berubah, serta persoalan manusia berkembang, maka dibutuhkan ijtihad dalam rangka memelihara agama.
- 4) Memelihara agama dengan menganjurkan dan melaksanakan dakwah. Dakwah merupakan upaya ummat Islam dalam memelihara pemahaman, pelaksanaan dan keberadaan agama.
- 5) Memelihara agama dengan mendirikan negara yang akan menjaga hubungan anatar individu dan masyarakat.

Negara diharapkan dapat menjaga pelaksanaan hukum islam dalam masyarakat. Ulama mengatakan bahwa mendirikan agama sebagai upaya memelihara agama dihukumkan wajib.

- 6) Memelihara agama dengan mengantisipasi rintangan yang ada, antara lain berupa: a) godaan nafsu; b) serangan pemikiran; c) Penyimpangan; d) berita bohong/penipuan.
- 7) Memelihara agama dengan perintah dan pelaksanaan jihad.

Memelihara agama (*hifz al-din*) merupakan pondasi bagi sekalian kewajiban dan *maqasid syari'ah* lainnya. Tanpa pilar ini, kewajiban lainnya tidaklah bermakna. Bahkan tujuan ini, meliputi tujuan-tujuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya. Tindakan apapun yang dilakukan oleh seorang muslim, mestinya mengacu kepada tujuan pemeliharaan agama. Artinya, ketika manusia melakukan segala sesuatu karena Allah, mengacu kepada tujuan universal (maqasid *Kulliyat'Aliyat*), belarti ia telah memelihara agama (*hifz al-din*).¹⁸⁸

2. Memelihara Jiwa (Hifzun-Nafs)

Menurut mayoritas ulama yang dipimpin oleh Imam Al-Ghazali¹⁸⁹ menempatkan *hifzun nafs* (menjaga jiwa) sampaikan, pendapat bahwa sebagai urutan kedua setelah *hifzu-din*.

Mereka memberikan contoh beberapa aturan (*syari'at*) yang Allah turunkan berkenaan dengan hal ini antara lain: dilarang membunuh tanpa landasan yang benar.¹⁹⁰

Bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hifzun-nafs* adalah menjaga hak diri untuk hidup, selamat, terhormat, dan mulia, sejalan dengan firman Allah Subhānahu wa Ta'ālā dalam al-Quran:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوُجْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

¹⁸⁸ Mohammad Abdi al-Maktsur dan Afrizal Ahmad, *Op.Cit*, h. 70-71.

¹⁸⁹ Lihat, Imam Al-Ghazali, *Al-Mustafa fi 'Ilm Al Ushul*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997), juz ke-1, h. 417.

¹⁹⁰ Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, alih bahasa Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 41-46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. *al-Isra*>[17]: ayat 70)¹⁹¹

Kata Amir Syarifuddin, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfa'atin* Dalam Al-qur an ditemukan ayat-ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan itu.¹⁹²

Diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (QS. *at-Tahjim*[66]: ayat 6)¹⁹³

Memelihara jiwa berdasarkan skala prioritassnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara dalam tingkat *daruriyat* seperti memenuhi kebutuhan makanan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- b. Memelihara dalam tingkat *hajiyyat* seperti menikmati makanan-makanan lezat.

¹⁹¹ Depertemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 289.

¹⁹² Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 235.

¹⁹³ Depertemen Agama, *Op. Cit*, h. 560.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memelihara dalam tingkat *tahsiniyat* seperti diterapkannya tata cara makan yang baik.¹⁹⁴

Al-Najjar memaknai *hifz al-nafs* dengan menjaga manusia seutuhnya, meliputi jiwa dan raganya; materi (*jism*) dan immateri (maknawi).

Islam datang untk menjaga kedua dimensi ini. Adapun cara (*masalik*) dalam memelihara jiwa (*nafs*) sebagai berikut;

- 1) Memelihara dimensi materi manusia (*jism*). Islam melarang manusia menceburkan dirinya ke dalam kebinasaan. Islam mengajarkan pemeliharaan tubuh, berolah raga, memelihara pertumbuhan badan.
- 2) Memelihara dimensi immateri (maknawi) manusia yang meliputi; menjaga kesucian diri dan menjaga keamanan (rasa aman).¹⁹⁵
3. **Memlihara akal (Hifzul-‘Aql).**

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah selalu menyuruh manusia untuk memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangkain *jalbu manfa’ah*. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar.¹⁹⁶

¹⁹⁴ Amrullah Hayatudin, *Op. Cit*, h. 214.

¹⁹⁵ Mohammad Abdi al-Maktsur dan Afrizal Ahmad, *Op.Cit*, h.75.

¹⁹⁶ Amir Syarifuddinmm *Op. Cit*, h. 236.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui akal nya, manusia mendapatkan petunjuk menuju ma'rifat kepada tuhan-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya.

Ditemukan dalam Al-qur an isyarat untuk menuntut ilmu. Diantaranya adalah firman Allah Subhānu wa Ta'āla dalam al-Quran:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Mujadilah [58]: ayat 11)¹⁹⁷

Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusaknya, atau menjadi pemiliknya sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan di dalamnya.¹⁹⁸

Memelihara akal berdasarkan skala prioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Memelihara akal dalam tingkat darurat seperti diharamkannya minuman-minuman keras.
- b. Hal ini kalau tidak di indahkan akan berakibat patal, yaitu kerusakan akal.

¹⁹⁷ Depertemen Agama RI, *Loc. Cit.*

¹⁹⁸ Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Op. Cit*, h, 94.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat* seperti anjuran untuk menuntut ilmu. Hal ini jika tidak diindahkan tidak akan sampai merusak akal.
- d. Memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyat* seperti menghindarkan diri dari mengahayal. Hal ini berkaitan erat dengan etika dan akhlak dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.¹⁹⁹

4. Memelihara keturunan (*Hifzul-Nazl*)

Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan menyalurkan naluri seksual secara halal dan sah. Perkawinan memelihara keturunan dan kehormatan. Melindungi keturunan adalah melestarikan dan memelihara nasab agar jelas. Islam menentang pergaulan bebas yang sering membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, seperti kehamilan di luar nikah, yang secara sosiologis menimbulkan aib bagi keluarganya. Untuk itu, dalam rangka menghindari hal-hal tersebut, Islam menetapkan untuk melindungi keturunan dan khormatan.²⁰⁰

Melindungi keturunan (*hifz-nasl*) berdasarkan prioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara keturunan dalam tingkat *daruriyat* seperti disyariatkannya nikah dan dilarangnya berzina. Aturan ini jika tidak dipenuhi akan mengancam keutuhan keturunan

¹⁹⁹ Amrullah Hayatudin, *Op. Cit*, h. 215.

²⁰⁰ *Ibid*, h. 216.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat* seperti di syariatkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak bagi suami, hal ini tidak dilakukan akan menyibukkan suami, karena ia harus membayar mahar *mitsl*.

c. Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyat* seperti di syariatkannya hitbah atau meminang dan walimah dalam perkawinan.²⁰¹

5. Memelihara harta (*hifzul-mal*)

Dalam hal ini, dari segi wujud, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk berupaya untuk mencari serta berupaya mendapatkan harta, Islam mensyariatkan kewajiban usaha mencari rizki dan membolehkan *mu'amalah* (hubungan usaha), *muhadalah* (tukar menukar), *tijarah* (perdagangan) dan *mudharabah* (berniaga dengan harta orang lain).²⁰²

Memelihara harta dilihat berdasarkan prioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara harta dalam tingkat *daruriyat*, seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta yang baik dan larangan mengambil harta orang lain.
- b. Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyat*, seperti disyariatkannya jual beli dengan jalan salam.

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² Mohammad Abdi al-Maktsur dan Afrizal Ahmad, *Op. Cit*, h. 82.

- c. Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti adanya anjuran menghindari diri dari usaha penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan akhlak berusha dan berbisnis.²⁰³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰³ Amrullah Hayatudin, *Op. Cit*, h. 216-217.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan perumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun isi dari putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A No. 1835/Pdt.G/2018/PA. Pbr. Mengenai hak asuh anak antara Rido Ardi Syahputra dan Febriani Damayanti Sibue, Hakim membacakan Putusan pada Tanggal 17 Desember 2018 yang diketuai Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H dengan menetapkan bapak (Ardi Syahputra) sebagai *hâdîm* (pemegang hak asuh anak).
2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A dalam perkara No. 1835/Pdt.G/2018/PA. Pbr. Tentang *Hâdîm*, hakim pengadilan Agama Pekanbaru memberikan putusan di luar Kompilasi Hukum Islam karena menemukan pertimbangan hukum berdasarkan *maqasid syari'ah*. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 *illatnya* adalah *mumayyiz* sedangkan *maqasid syari'ah illatnya* adalah maslahat dan maslahat itu berkaitan dengan *al-Ushul al-Khamsah*.
3. Apabila ditinjau berdasarkan *maqasid syari'ah* putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A No. 1835/Pdt.G/2018/PA. Pbr. Mengenai hak asuh anak, pengalihan hak asuh anak dari ibu ke bapak sangatlah relevan dalam rangka memelihara agama (*hîfzu Din*), memelihara jiwa (*hîfzu al-nafs*), memelihara akal (*hîfzu al-'aql*), memelihara keturunan (*hîfzu al-nasb*), dan memelihara harta (*hîfzu al-mal*).

B. Saran

1. Bagi bapak (pemegang hak asuh anak) hendaklah memperhatikan kebutuhan anak baik dari segi jasmani maupun rohani, karena anak adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhānu wa Ta'ala yang mana do'anya nanti menjadi syafaat bagi orang tuanya.
2. Bahwa teruntuk para Hakim Pengadilan Agama khususnya, hendaklah dalam segala putusan selalu memperhatikan aspek maslahat bagi para pencari keadilan, karena Allah Subhānu wa Ta'ala akan memintak pertanggung jawaban nantinya di akhirat kelak terhadap semua keputusan/ketetapan para Hakim.
3. Teruntuk para penuntut ilmu lebih khusus para calon Hakim Pengadilan Agama, hendaklah memperdalam ilmu agama/hukum Islam, karena permasalahan di sosial akan terus berkembang dengan berjalannya waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan se Wilayah Riau*, Pekanbaru. T.p., 1995.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopeledia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999).
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Abdul Majiid Mahmud Mathlub, *Al Wajiz Fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah*, alih bahasa oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Solo: Era Intrmedia. 2005).
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-5.
- Abi al Fida' Ismail ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, (Kairo: Muassasah Quthubah wa MAktabah Aulad al-Syaikh li al-Turats, 2000), Juz 2
- Abu Abdillah Muhammad bin Anshari al-Rasha', *Syarah Hudu Al Arafah Al Hidayah al al-Syafiyah*, (Beirut: Dar al-Gharab al-Islami, 1993).
- Abu Dawud, Sulaiman bin al-'Asy as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud, Kitab Nikah Bab Man, Ahaqu Li al-Walad*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), Cet. Ke-2.
- Abu Dawud, Sulaiman bin al-'Asy as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud, Kitab Nikah Bab Man, Ahaqu Li al-Walad* (Juz II; Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M).
- Abu Hanifah an-Nu'man, *Musnad Abu al-Hashafi*, (Mesir: tp. Th), juz 2.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, Citra Niaga Perguruan Tinggi, 1983).
- Al-Ghazali Imam, *Al-Mustafa fi 'Ilm Al Ushul*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997), juz ke-1.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* , jilid 2, (Jakarta: Kencana 2009).

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), Ed ke – 1.

Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2019

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996).

Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*(Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasag Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh) Edisi (Jakarta: kencana,2010), Cet. Ke-2.

Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012).

Cik Hasan Bistri, *Peradilan Agama di Indonesia Edis Revisi* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-4.

Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2001).

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008).

Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Banung: Pustaka, 1948).

Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid Syariah Al-Syariag dalam Hukum Islam*.

Hamka, *Sejarah Umat Islam*, jilid III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981)

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah al-Bukhari*, alih bahasa Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)

Ibnu Mansur al-Afriqi, *lisan a- 'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadrm t.th).

Imam al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Anshor, t.th), juz 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana, 2010)
- Jalan al-Din, al_Suyuti, al-Jami' al-Sagir, (Bandung: al-Ma'arif, t.t.), juz 2
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1999/2000).
- M. Yahya Harahap, *kedudukan, kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993)
- M. Yahya Harahap,, *Keduduka Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*, Cet. Ke- III,(Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), Cet. Ke-3.
- Magono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2019)
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Moh Dahlan., *Abdullah Ahmed an-Na'im: Epitemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Moh. Rifa'I dkk, *Terjemah Khulashah Kifayutul Akhyar*, (Semarang: Toba Putra, 1978).
- Mohammad Abdi Al-Maktsur, *Maqasid Syariah teori dan kaedah-kaedah Terapannya dalam Ijtihad*, (Riau: Suska Riau Press, 2015).
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, (Bandung: Darus Sunnah, 2012).
- Muhammad Suhain Suhaibi,, *Al-Syari'ah al Islamiyah Dirasah Muqaranah Baina Mazahib Ahl Alsunna wa Al Mazahab al-Ja'fariyah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah, 2000).
- Muhammad Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syariah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966).
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), cet. Ke-2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Nur Djaman, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993).
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1985).
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesin dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet ke 1.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet-2.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Asep Sobri, Muhil Dhofir, Sofwan Abbas, dan Amir Hamzah, (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2000).
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung, Bina Cipta, 1977)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *al-Misbahul Munir fi Tahzibi Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Abu Ihsan al-Atsiri dkk, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012), Cet ke-6
- Syatibi, *Muwafaqat*, jilid 2, (Saudi Arabian: Dar Ibn Affan, 1997).
- Tihami dan Sohari, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Wanita Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet, Ke-4.
- Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1977)
- Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974, (New Merah Putih, 2009).
- UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Depok: Gema Insani, 2007).

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, dan Petusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Yusuf Qarawi, *fiqih maqasid syariah* , alih bahasa Arif Munandar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).



UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **"Pengalihan Hak Asuh Anak Dari Ibu Ke Bapak Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr)"** ditulis oleh saudara :

Nama : MUHAMMAD HAFIS
NIM : 11621100794
Program Studi : HUKUM KELUARGA
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : KAMIS, 11 JULI 2019
Narasumber : Dra. Asmiwati, MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,
Narasumber

Aspendi, S.Ag., M. Si

NIP. NIP. 19610918 198803 1 002

Dra. Asmiwati, MA

NIP. 19611231 199402 1 002

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

1. NAMA

: Muhammad hafis

2. NOMOR MAHASISWA

: 11621100224

3. JUDUL USUL PENELITIAN

: Tinjauan hukum islam tentang putusan hakim
pengadilan agama pekanabru no
1835/pdt.g.2018/pa.pbr mengenai hak asuh anak

4. Hari/Tgl. Diseminarkan

: Kamis / 11 Juli 2019

5. Hasil Seminar dirumuskan adalah

a. Judul

: Disetujui / Ditolak / Disempurnakan

b. Latar Belakang Masalah

: Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan

c. Permasalahan

: Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi
jelas

d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

: Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan

e. Kerangka Teoritis (jika ada)

: Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan

f. Rumusan Hipotesis (jika ada)

: Cukup Tajam / Perlu Dipertajam

g. Metode Penelitian

: Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan

h. Daftar Pustaka

: Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah
yang diteliti

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya
disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Dra. Asmiwati, MA

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstsp@riau.go.id Kode Pos : 28



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/27246
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 41/P/PP.00.9/8478/2019 Tanggal 29 Oktober 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : MUHAMMAD HAFIS
2. NIM / KTP : 11621100794
3. Program Studi : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DARI IBU KE BAPAK DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO.1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr)
7. Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS 1 A

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Oktober 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Disusun :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS 1.A

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru (28281)

Telepon : 0761-572855, Faksimile : 0761-839718

Email : umum@pa-pekanbaru.go.id

Website: www.pa-pekanbaru.go.id

Nomor : W-1A1/7074/PB.00/11/2019

9 Nopember 2019

Lampiran : 1
Hal : 1
Isi : Izin Riset/ Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

PEKANBARU

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor Un.04/F.1/PP.00.9/8478/2019, tanggal 29 Oktober 2019, perihal izin Penelitian sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Muhammad Hafis

NIM : 11621100794

Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S.1

Dapat diizinkan untuk melakukan Penelitian/riset dalam rangka penyelesaian studi dan penulisan Skripsi yang berjudul "*Pengalihan Hak Asuh Anak Dari Ibu ke Bapak Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No.1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr)*", dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

Wassalam
Panitera

Muhammad Yasir Nasution., M.A

Tembusan

1. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru (sebagai laporan)

2. Mahasiswa yang bersangkutan

3. Arsip

4. Arsip

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MUHAMMAD HAFIS**

NIM : **11621100794**

Program Studi : **HUKUM KELUARGA**

Judul : ***Pengalihan Hak Asuh Anak Dari Ibu Ke Bapak Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr)***

Pembimbing : **Dr. H. Johari, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Maret 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIK. 198804302019031010



SALINAN UNTUK PENELITIAN MAHASISWA / PENELITI

PUTUSAN

Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Richo Ardi Syahputra bin Yatiman, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kamboja Gang Kamboja Indah Perum Valley 1 No. A.1 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Febriani Damayanti Sibuea binti Justinus Peterson Sibuea, umur 24 tahun, dahulu beragama Islam, sekarang beragama Kristen pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kamboja Gang Kamboja Indah Perum Valley 1 No. A.1 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 21 Nopember 2018, yang diterima dan didaftar di

halaman 1 dari 19 Halaman Put.No. 1835/Pdt.G/PA.Pbr

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Tak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim



Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr., pada tanggal 21 Nopember 2018 dengan alasan-

alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2017, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, sebagaimana dalam Duplikat/ Kutipan Akta Nikah nomor : 116/18/IX/2017 tanggal 29 September 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa sebelum menikah Termohon seorang mualaf dan berstatus perawan, sedang kan Pemohon berstatus Jejaka, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kamboja Gg. Kamboja Indah Perum Valley 1 No. A.1 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama menikah tersebut telah berhubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Mariam Tazkia-Ardi (perempuan), umur 7 bulan;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohondan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal Tahun 2018 rumah tangga Pemohondengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengar kata-kata Pemohon, apabila dinasehati tidak pernah diliraukan;
 - c. Termohon dan Pemohon sering bertengkar hanya karena hal-hal kecil;
 - d. Setiap bertengkar Termohon selalu meminta cerai;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2018 yang mana Termohon tidak lagi menganut Agama Islam,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



dan Termohon kembali menganut agama Nasrani, karena sebelum pernikahan Termohon adalah seorang muafak;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas pernikahan Pemohon dan Termohon

sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin, maka akan lebih baik pernikahan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian;

8. Bahwa oleh karena Termohon tidak lagi menganut agama islam (murtad) maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (RIDHO ARDI SYAHPUTRA bin YATIMAN) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (FEBRIANI DAMAYANTI SIBUEA binti JUSTINUS PETERSON SIBUEA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menetapkan anak yang bernama Mariam Tazkia Ardi (perempuan), umur 7 bulan, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi, dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H. Samiruddin, M.H., yang disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan Penetapan Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 03 Desember 2018;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 03 Desember 2018 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Selanjutnya dibacakanlah permohonan pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan pemohon;

Terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan identitas Termohon kecuali agama Termohon. Agama termohon adalah Kristen;
2. Bahwa Termohon membenarkan pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan telah mempunyai anak 1 orang;
3. Bahwa Termohon membenarkan rumah tinggal Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 dengan sebab-sebab sebagaimana disebutkan Pemohon dalam permohonannya;



4. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2018 karena Termohon telah kembali beragama Kristen sejak bulan September 2018 yang lalu;
5. Bahwa Termohon keberatan apabila Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak, karena Termohon lebih berhak sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil;
6. Bahwa Termohon berasal dari Batak dengan marga Sibuea dimana marga anak mengikuti marga ayahnya.
7. Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan swasta dan sewaktu Termohon bekerja anak diasuh dan dijaga oleh Pemohon dan ibu Pemohon;
8. Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Kemudian Pemohon memberikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap seperti dalil permohonan Pemohon;

Atas replik Pemohon tersebut Termohon memberikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya seperti dalam jawaban Termohon terdahulu;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/18/IX/2017 tanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sail., Kota Pekanbaru.. yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-08062018-0026 atas nama Mariam Tazkia Ardi (perempuan), umur 7 bulan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, tanggal 04 Juli 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.2; Bukti tertulis Pemohon tersebut telah dikonfirmasi kepada Termohon dan Termohon tidak membantahnya;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Arnis binti Abbas dan M.

1



Saksi I. Nama Arnis binti Abbas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyebarluaskan kembali hasil penelitian hanya untuk keperluan penelitian.

Bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan saksi tetapi tidak berhasil, karena Termohon sudah kembali ke Agama semula dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak seiman lagi;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Mariam Tazkia Ardi umur 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon dan Termohon;

- Bahwa siang harinya anak Pemohon dengan Termohon diasuh dan dijaga oleh Pemohon dan ibu Pemohon, dikarenakan Termohon bekerja;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya.

Nama Saksi : I. M. Sabri bin Syahrial.

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah tetapi sudah berpisah ranjang dimana Pemohon tidur dengan anaknya namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dengan Termohon pisah ranjang;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang karena saksi berkunjung ke rumah Pemohon;

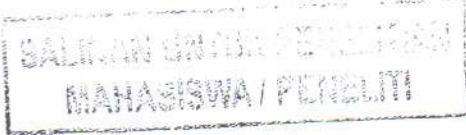
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Pemohon berpisah ranjang dengan Termohon karena Termohon sudah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan karena Termohon yang mengakuinya kepada saksi dan Termohon sudah pergi ke Gereja di GBI Nangka;

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon kembali ke agama semula sudah dua bulan yang lalu yaitu sejak bulan September 2018 yang lalu ;

- Bahwa yang saksi ketahui semenjak Pemohon kembali ke agamanya semula, akhirnya Pemohon mengajukan perceraian dengan Termohon

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebab antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak seiman lagi, gar
antara Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah ranjang;

Bahwa yang saksi ketahui waktu Pemohon menikah dengan Termohon,
Termohon beragama Islam, semula Termohon beragama Kristen
Protestan;

Bahwa usaha keluarga Pemohon untuk mendamaikan Pemohon
dengan Termohon telah dilakukan sebelum Termohon pindah agama
tetapi tidak berhasil, hal tersebut dikarenakan Termohon sudah kembali
ke Agamanya semula dan antara Pemohon dengan Termohon sudah
tidak seiman lagi;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak
perempuan yang bernama Mariam Tazkia Ardi umur 7 (tujuh) bulan;

Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa siang harinya anak Pemohon dengan Termohon diasuh dan
dijaga oleh Pemohon dan ibu Pemohon, dikarenakan Termohon
bekerja;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi
kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak
keberatan dan membenarkannya.

Untuk mengemukakan dalil jawabannya Termohon, Termohon telah
mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Nomor
001/Ket/SG/BGI/2018, tanggal 04 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh
Gereja Bethel Indonesia Sigambir Gambir, yang telah dibubuhi meterai cukup,
oleh Majelis Hakim, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1;

Bahwa, dipersidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan
bukti tertulis lain dan bukti saksi dan mencukupkan bukti tersebut;

Di persidangan, Hakim Ketua Majelis telah memberikan kesempatan
kepada Termohon untuk mengajukan bukti, namun Termohon menyatakan
tidak akan mengajukan bukti apapun;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan pada tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya
halaman 8 dari 19 Halaman Put.No. 1835/Pdt.G/PA.Pbr

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan persidangan pada tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya dan mohon putusan.

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, Pemohon dengan Termohon telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. sasmiruddin, M.H, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 03 Desember 2018 bahwa Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya pula mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil;



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dicetak atau diipuk kembali tanpa izin UIN Suska Riau.



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

1. Berdasarkan Termohon telah kembali ke agama Kristen Protestan ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh karena itu bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Surat Keterangan An. Febriani Damayanti Sibuea (T.1) telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti tersebut





menerangkan Febriani Damayanti Sibuea sudah kembali kepada kepercayaan semula yaitu Kristen Protestan, oleh karena itu bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat. karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama Arnis binti Abbas dan M. Sabri bin Syahrial;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama Arnis binti Abbas menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak dua bulan yang lalu, karena Termohon kembali ke agama Kristen Protestan lagi dan sekarang Pemohon mengajukan perceraian ini karena sudah tidak seiman lagi dengan Termohon, saksi mengetahui Termohon kembali lagi ke agama Kristen Protestan satu bulan yang lalu dari pengakuan Termohon dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama M. Sabri bin Syahrial menerangkan bahwa antara Pemohon telah pisah ranjang sejak Februari 2018, karena Termohon kembali ke agama Kristen Protestan lagi dan sekarang Pemohon mengajukan perceraian ini karena sudah tidak seiman lagi dengan Termohon, saksi mengetahui Pemohon kembali lagi ke agama Kristen Protestan satu bulan yang lalu berdasarkan keterangan Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Arnis binti Abbas adalah ibu Pemohon, dan saksi kedua Pemohon bernama M. Sabri bin Syahrial adalah saudara sepupu Pemohon, yang masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama Arnis binti Abbas dan M. Sabri bin Syahrial telah memberikan keterangan bahwa Termohon telah berpindah agama Kristen Protestan semenjak dua bulan yang lalu, dan saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan

Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Pemohon serta bukti tertulis Termohon berupa bukti T.1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya fakta hukum bahwa sejak 2 bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau cekcok disebabkan Termohon kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan, yang akhirnya sejak September 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang. Selama berpisah tidak ada hubungan bathin, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Termohon tetap kembali ke agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyahkan oleh pengaruh apapun;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan

sebagaimana dimaksud dalam pasal dan ayat tersebut di atas, dimana hal tersebut disebabkan rapuhnya sendi-sendi agama yang timbul akibat Termohon keluar dari agama Islam (*murtad*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin fiqh yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 389, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan :

أذارت الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذا الفرقة تصير فسخاً.

Artinya : "Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa *fasakh*;

Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan *fasakh* disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (*vide* Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, Daral-Qalam, Kuwait, 1990. hlm. 60). Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* menyebutkan "*fasakh* hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi *aqad*, yang menjadikan *aqad* tersebut tidak sah." (*vide* Abu Zahroh, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950, hlm. 324);

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqh, suatu pernikahan yang sudah terjalin dengan sah bisa mengalami *fasakh* atau rusak tanpa harus adanya keputusan Hakim dengan empat sebab : a) Rusaknya akad; b) Munculnya kemahruman karena *mushoharoh* (besan atau mantu); c) *Murtad*; d) *Li'an* (*vide* Ali Hasabillah, *Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata'allaqu biha min iddatin wa nasabin)*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, tt, hlm. 174). Menurut fatwa para ulama'



SALINAN UNTUK PENELITIAN
MAHASISWA / PENELITI



Bukhara, jika istri murtad, maka pernikahannya juga *fasakh*. Namun, mes-
demikian, jika suatu ketika si istri tadi dipaksa lagi untuk masuk Islam,
kemudian keduanya memperbaharui *aqadnya*, dengan tambahan mahar yang

ringan, maka suami istri yang tadinya sudah *fasakh* tersebut, dapat kembali
bersama lagi. Hal ini dilakukan dengan tujuan menutup peluang bagi para istri
untuk lari dari para suaminya, dengan pura-pura melakukan *riddah/murtad* (vide
Ali Hasabillah, hlm. 175);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan,
ternyata sejak 02 September 2018 Termohon telah keluar dari memeluk agama
Islam (murtad) kembali ke agama Kristen Protestan, dan selama itu pula
Termohon tidak pernah kembali lagi memeluk agama Islam, oleh karenanya
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon memang telah murtad
sampai putusan ini dibacakan Termohon tidak pernah kembali kepada Islam
dan tetap dalam kemurtadannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan
Termohon dinyatakan putus karena *fasakh*. Dengan demikian, alasan
perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.
Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan
Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan
Termohon putus karena *fasakh* (batal demi hukum) yang telah dijatuhkan
secara *ex officio* oleh Majelis Hakim karena Jabatannya, maka terhadap
permohonan Pemohon untuk memberikan ijin mengikrarkan talak menjadi tidak
relevan, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan putusan dengan
memfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan
Pasal 116 ayat (2) huruf (c). Selanjutnya, mengenai keterkaitan pengajuan
permohonan Pemohon untuk penyelesaian perkara ini di Pengadilan, hal ini
menurut Majelis Hakim semata-mata hanya untuk memenuhi kehendak
Undang-Undang agar bubarnya perkawinan tersebut sah secara formil yuridis,
memiliki kekuatan hukum;

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

d. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

e. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

f. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

g. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

h. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

i. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

j. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

k. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

l. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

m. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

n. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

o. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

p. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

q. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

r. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

s. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

t. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

u. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

v. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

w. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

x. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

y. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

z. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

aa. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

ab. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

ac. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

ad. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

ae. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

af. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

ag. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

ah. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

ai. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

aj. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

ak. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

al. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

am. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa



SALINAN UNTUK PENELITIAN
MAHASISWA / PENELITI



Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai pemelihara anak (hadhanah) yang bernama Maryam

Tazkiya Ardi binti Ridho Ardi Sayahputra (perempuan), umur 7 bulan dan

dalam jawabannya Termohon mohon agar Termohon ditetapkan sebagai

pemelihara anak (hadhanah) dikarenakan anak masih memerlukan air susu ibu

dan dalam Repliknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan dalam

Dupliknya Termohon tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon

tidak terdapat kesepakatan tentang pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim

akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy

Akte Kelahiran An. Maryam Tazkiya Ardi (P.2) telah dibubuhi meterai

seukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya dan bukti tersebut

menunjukkan Maryam Tazkiya Ardi adalah anak Pemohon dengan Termohon

yang saat ini baru berumur 7 bulan, oleh karena itu bukti P.1 telah memenuhi

syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih

lanjut;

Menimbang, bahwa secara yuris sebagaimana maksud Pasal 105 ayat

(1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang

belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali

ibunya meninggal dunia atau berperilaku tidak baik bagi perkembangan jasmani

dan/atau rohani anak dan berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum

Islam, maka hak pemeliharaan dapat dialihkan kepada ayah anak berdasarkan

putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Termohon berasal dari Batak,

maka dalam struktur adat Batak dengan Marga Sibuea garis keturunan yang

dipedomani adalah garis keturunan ayah (patrilineal) meskipun kedua orang tua

mereka bercerai;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis dengan mengambil alih doktrin ahli

Hukum Islam Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ilmu Ushul Fikh menjelaskan

bahwa tujuan diturunkan syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat

manusia yang dikenal dengan Maqashidus Syar'iyah;



Menimbang, bahwa dalam teori Maqashidus Syar'iyah ada lima prinsip dasar/pokok yang harus dipelihara yaitu Agama, Nasab, Harta, Jiwa dan keturunan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Maryam Tazkia Ardi binti Ridho Ardi Syahputra dilahirkan dari orang tua muslim, secara langsung anak mengikuti agama kedua orang tuanya, maka untuk tetap terjaganya agama (agidah) si anak, oleh karena Termohon sudah kembali ke agama semula maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 4 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka yang berhak menjadi pemegang hadhanah adalah orang yang seagama dengan anak, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, mejelis Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hadhanah anak yang bernama Maryam Tazkia Ardi binti Ridho Ardi Syahputra;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dengan Termohon berada dalam pemeliharaan Pemohon sebagai Pemegang Hadhanah sedangkan anak Pemohon dengan Termohon sampai saat ini masih berumur 7 bulan dan anak belum bisa memenuhi kebutuhan jasmani sendiri dan masih membutuhkan Air Susu ibunya, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada ibu untuk menyusukan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Maryam Tazkia Ardi binti Ridho Ardi Syahputra di tempat dimana anak tersebut dipelihara oleh Pemohon dan selama menyusukan Termohon tidak boleh memberikan suatu baik makanan maupun minuman yang dilarang dalam ajaran Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap anak Pemohon dengan Termohon, namun secara kehidupan dunia, Pemohon maupun Termohon sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Termohon sebagai ibu dan hak Pemohon sebagai ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang dari masing masing pihak. apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan

terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan" Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memfasakh pernikahan Pemohon (Ridho Ardi Syahputra bin Yatiman) dengan Termohon (Febriani Damayanti Sibuea binti Justinus Peterson Sibuea).
3. Menetapkan Pemohon (Ridho Ardi Syahputra bin Yatiman) sebagai pemegang Hak Hadhanah anak yang bernama Mariam Tazkia Ardi binti Ridho Ardi syahputra (perempuan), umur 7 bulan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 304.000. (tiga ratus empat ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Desember

halaman 17 dari 19 Halaman Put.No. 1835/Pdt.G/PA.Pbr

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



SALINAN DOKUMEN PENELITIAN
MAHASISWA / PENELITIAN



2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, Qamariyah, kami Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hidayati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

METERAI
TEMPER
Rp 6.000
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Drs. Abdul Aziz, M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayati, S.Ag

Hakim Ketua Majelis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 63.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 304.000,-

(tiga ratus empat ribu rupiah)

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SALINAN UNTUK PENERBITAN
MAHASISWA / PENELITIAN



UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD HAFIZ, Kelahiran Hatupangan, 15 Mei 1997, anak ke tujuh dari delapan bersaudara, yang lahir dari seorang ibu bernama Sapinah Lubis dan Ayah Muluk Nasution. Penulis memulai pendidikan SDN 272 Hotalobu 2003 dan melanjutkan Mts dan MA di Pondok Pesantren Darul 'Ulum 2009, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Selama menjalani masa pendidikan penulis aktif di Komunitas Rohani Islam (ROHIS) baik tingkat Fakultas maupun Universitas dan Penulis aktif juga di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syariah dan Hukum 2018, selama penulis menjalani pendidikan penulis pernah mendapat beasiswa dari Peningkatan prestasi akademik (PPA) dan beasiswa PTPN V. Pada tgl 21 Mei 2019 Penulis mengajukan judul penelitian skripsi dan pada 8 Juli 2019 penulis melaksanakan KKN di Desa Bunut, Kec. Bunut, Kab. Pelalawan, Tgl 11 pada bulan dan tahun yang sama penulis melaksanakan ujian Proposal, kemudian penulis melanjutkan penelitian kepustakaan dengan judul “PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DARI IBU KE BAPAK DALAM PERPEKTIF MAQASID SYAR'IAH (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 a No. 1835/Pdt. G/2018/PA.Pbr) dibawah bimbingan Dr. H. Johari, M.Ag, kemudian disetujui 23 Oktober 2019 oleh pembimbing skripsi untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada akhirnya penulis melaksanakan ujian skripsi (sidang munaqasah) pada hari Senin tgl 9 Maret 2020 dan alhamdulillah dinyatakan LULUS dengan predikat Cum Laude.

UIN SUSKA RIAU